



**KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN ILO MENGENAI
PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI GARMEN DI INDIA**

diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Hubungan Internasional

SKRIPSI

Oleh :

Annisa Zharfan Ghassani

190910101123

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL

JEMBER

2024

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua terkasih, Umi Rina Hermawati dan Abi Ahmad Nuri yang telah memberikan doa, dukungan dan dorongan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada penulis. Atas doa dan dorongan dari Umi dan Abi, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat mewujudkan mimpi.
2. Para Guru dan Dosen yang sudah sangat berjasa dalam membimbing penulis sedari kecil hingga menjadi Sarjana, semoga ilmu yang diberikan akan selalu menjadi amal jariyah dan dapat penulis terapkan di kehidupan masyarakat.
3. Almamater Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember. Bahkan penulis tidak menyangka akan menjadi alumni dari program studi ini, terima kasih untuk tidak menyerah dan terus berjuang.

MOTTO

“god does not burden any soul with more than it can bear”

Allah tidak membebani jiwa manapun melainkan sesuai dengan kesanggupannya

QS.(2): 286



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Zharfan Ghassani

NIM : 190910101123

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kerja ilmiah yang berjudul: *Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan ILO Mengenai Pekerja Anak Dalam Industri Garmen di India* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada instansi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Agustus 2023

(ttd & materai)

Annisa Zharfan Ghassani

NIM 190910101123

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN ILO MENGENAI
PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI GARMEN DI INDIA**

Oleh :

Annisa Zharfan Ghassani

190910101123

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agung Purwanto, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan ILO Mengenai Pekerja Anak Dalam Industri Garmen di India* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.

(.....)

NIP : 196802291998031001

2. Pembimbing Anggota

Nama : Drs. Agung Purwanto, M.Si.

(.....)

NIP : 196810221993031002

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

(.....)

NIP : 196305261989022001

2. Penguji Anggota

Nama : Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos., M.A.

(.....)

NIP : 197708102006042003

ABSTRAK

India merupakan negara yang termasuk ke dalam sepuluh negara penghasil pakaian terbesar di dunia, namun dibalik pencapaian India tersebut terdapat fenomena pekerja anak di bawah umur yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan India terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh ILO mengenai batasan usia minimum pada pekerja anak. Dalam menganalisis fenomena yang terjadi, Penulis menggunakan teori *Non-Compliance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi-kualitatif di mana Penulis berupaya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa secara objektif. Adapun data pada penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai kajian literatur seperti, jurnal, buku, buku elektronik, berita daring, perpustakaan nasional daring, laman resmi pemerintah, dan situs internet. Hasil dari penelitian ini yaitu, ketidakpatuhan India terhadap ketentuan ILO tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pertimbangan diantaranya berupa tingginya angka kemiskinan di India dan kurangnya kesempatan pendidikan.

Kata Kunci: Human Security, India, Anak di bawah Umur, ILO, Industri Garmen

ABSTRACT

India is a country that is included in the ten largest clothing producing countries in the world, but behind India's achievements there is the phenomenon of underage child labor involved. This article aims to determine the causes of India's non-compliance with regulations issued by the ILO regarding minimum age limits for child labor. In analyzing the phenomena that occur, the author uses the Non-Compliance theory. This research uses a quasi-qualitative approach where the author attempts to describe or describe an event objectively. The data in this research comes from secondary data sources collected from various literature studies such as journals, books, electronic books, online news, online national libraries, official

government websites and internet sites. The results of this research are that India's non-compliance with ILO provisions is caused by several factors that are taken into consideration, including the high poverty rate in India and lack of educational opportunities.

Keywords: *Human Security, India, Minors, ILO, Garment industry*



RINGKASAN

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan ILO Mengenai Pekerja Anak Dalam Industri Garmen di India; Annisa Zharfan Ghassani, 190910101123; 2024; 59 halaman; Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

India menjadi salah satu negara eksportir garmen utama yang tidak bergantung pada impor dalam beberapa dekade terakhir dan semakin terintegrasi ke dalam rantai pasokan garmen global. Industri garmen menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di India yang mempekerjakan 45 juta orang dan berkontribusi terhadap 4% dari total PDB. Dibalik kesuksesan industri garmen di India terdapat fenomena pekerja anak ilegal yang terlibat. India telah meratifikasi konvensi ILO No.138 mengenai pekerja anak di bawah usia minimum, namun dalam industri garmen di India masih ditemukan pekerja anak di bawah usia 14 tahun, sehingga adanya ketidakpatuhan India terhadap rezim internasional yang mereka ratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakpatuhan India terhadap konvensi ILO No.138 dengan masih adanya pekerja di bawah usia minimum pada industri garmen.

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Rezim Internasional dan teori *Non-Compliance* untuk menjelaskan isu yang terjadi di India. Studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuasi-kualitatif, atau biasa disebut dengan kualitatif semu. Tujuan utama dari metode penelitian kuasi-kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa secara objektif (Cropley, 2021). Pendekatan kuasi kualitatif masih memungkinkan untuk menggunakan teori sebagai alat penelitian. Persamaan pendekatan kuasi kualitatif dengan kualitatif murni adalah sama-sama menitikberatkan kesertaan peneliti di

dalamnya (Creswell, 2008).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan dengan teori yang diangkat dalam kasus ketidakpatuhan suatu negara disebabkan karena tiga hal ketidakpatuhan karena preferensi, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan. Dari ketiga kategori tersebut India lebih condong ke arah mana atau justru tidak patuh karena semua kategori tersebut terjadi di India. Dengan telah dibuatnya kebijakan dan peraturan mengenai larangan pekerja anak saja tidak cukup, apakah penyebab kasus ini terjadi karena kelalaian dari faktor luar atau justru dari pemerintah India itu sendiri



PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan ILO Mengenai Pekerja Anak Dalam Industri Garmen di India*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosiasl dan Politik, Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph dan Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak sekali kontribusi serta meluangkan waktunya untuk membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pmbimbing Akademik (DPA) sekaligus Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah menyemangati penulis sehingga penulis termotivasi untuk dapat melanjutkan penulisan skripsi ini.
3. Dra. Sri Yuniati, M.Si dan Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos., M.A selaku tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini baik saat sidang skripsi maupun saat revisi.
4. Orang tua serta keluarga besar penulis yang turut memberi semangat dan memberi pengertian serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa tekanan.
5. Sahabat-sahabat penulis terkhususnya Fina, Sabre, Nyaplek, Ebi, Amal, Uul, Geral dan segenap warga LAOLO selaku teman seperjuangan penulis yang

telah banyak membantu serta menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Akhmad Akbar Trinanda Putra selaku orang spesial penulis yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam setiap proses perjalanan hingga dapat mencapai pada titik akhir penulisan skripsi ini.
7. Semua orang yang telah hadir di hidup penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, terima kasih karena kehadirannya telah membantu penulis.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun saya berharap apa yang telah saya tulis dalam skripsi ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan khalayak pembaca.

Jember, 29 Juli 2024

Penulis,

Annisa Zharfan Ghassani

NIM 190910101123

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Konsep.....	7
2.1.1 Rezim Internasional	7
2.2 Kerangka Teori	10
<i>Non-Compliance Theory</i>	10
2.3 Penelitian Terdahulu	13
2.4 Ringkasan Penerapan Teori.....	14
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Pendekatan Penelitian	16

3.2	Objek dan Fokus Penelitian	16
3.3	Teknik Pengumpulan Data	17
3.4	Keabsahan Data	18
3.5	Analisis Data	18
3.6	Sistematika Penulisan	20
BAB 4. FENOMENA PEKERJA ANAK DI INDUSTRI GARMEN DAN ANALISA KETIDAKPATUHAN INDIA PADA ATURAN ILO		
4.1	Kondisi Pekerja Anak Pada Industri Garmen di India.....	21
4.2	Analisa Yang Menyebabkan Ketidakpatuhan India Terhadap Ketentuan ILO Berdasarkan <i>Non-Compliance Theory</i>	27
4.2.1	Ketidakpatuhan sebagai preferensi (<i>non-compliance as preference</i>)	27
4.2.2	Ketidakpatuhan karena ketidakmampuan (<i>non-compliance due to incapacity</i>).....	33
4.2.2.1	Finansial (<i>financial</i>)	34
4.2.2.2	Administratif (<i>administrative</i>)	35
4.2.3	Ketidakpatuhan karena ketidaksengajaan (<i>non-compliance due to inadvertence</i>)	46
BAB 5. KESIMPULAN.....		53
DAFTAR PUSTAKA		55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Trend of Economically Active Children in India (5-14 years)	1
Tabel 1. 2 Presentase Pekerja Anak di India Berdasarkan Sektor, Rentang Usia 5-14 Tahun (2021).....	4
Tabel 4. 1 Peraturan Perundang-Undangan India tentang Pekerja Anak.....	29
Tabel 4. 2 Ratifikasi India terhadap Konvensi Internasional tentang Pekerja Anak .	30
Tabel 4. 3 Bantuan Dana ATUFS dan PowerTex India untuk Industri Garmen di Maharashtra	35
Tabel 4. 4 <i>High-Low Compliance and Effectiveness</i>	47
Tabel 4. 5 Kebijakan Utama Pemerintah India Terkait Pekerja Anak.....	48
Tabel 4. 6 Program Sosial Utama untuk Menangani Pekerja Anak.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kondisi Pekerja Anak Pada Industri Garmen di India 24
Gambar 4. 2 Data Pekerja Anak di Delhi..... 25



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pekerja anak sudah menjadi tantangan bagi India sejak beberapa dekade. Pemerintah India telah melakukan beberapa upaya serta langkah pro-aktif untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah India telah membuat Undang-Undang Pekerja Anak (Larangan & Peraturan) yang diberlakukan pada tahun 1986, dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa dilarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia 14-15 tahun dalam pekerjaan dan proses tertentu yang berbahaya serta mengatur kondisi kerja anak dalam pekerjaan tertentu lainnya (Chief Labour Commissioner (Central), 2023). Namun pada tahun 2001 menurut angka sensus terdapat 1,26 crore¹ atau sekitar 12,6 juta anak pada kelompok usia 5-14 tahun yang bekerja dari total populasi anak di India sebanyak 25,2 crore, lalu pada tahun 2004-2005 jumlah anak yang bekerja diperkirakan mencapai 90,75 lakh² atau sekitar 9,75 juta (National Informatic Center (NIC), 2023). Hal ini dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 Trend of Economically Active Children in India (5-14 years)

Year	Number of working children	Total child population
1981 (Census)	1.30 crore	-
1991 (Census)	1.13 crore	20.92 crore
2001 (Census)	*1.26 crore	25.20 crore
2004-2005 (NSSO)	90.75 lakh	
2009-2010 (NSSO)	49.84 lakh	

Sumber: (Ministry of Labour & Employment, Government of India, 2023)

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa kondisi pekerja anak di bawah usia 14 tahun di India sebelum tahun 2016 memiliki angka yang cukup tinggi.

¹ **crore** (cr) adalah satuan sistem angka India yang berarti sepuluh juta (10.000.000)

² **lakh** (L atau lac) adalah satuan dalam sistem bilangan India yang sama dengan seratus ribu (100.000)

Pada tahun 2016 Undang-Undang Amandemen Pekerja Anak (Larangan & Peraturan)³ diubah dan menetapkan larangan lengkap untuk tidak mempekerjakan anak-anak di bawah usia 14 tahun dalam jenis pekerjaan dan proses apapun (PIB Delhi, 2022). Lalu pada 13 Juni 2017 India meratifikasi Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum untuk bekerja dengan usia minimum yang ditentukan untuk diperbolehkan bekerja adalah usia 14 tahun (ILO). Setelah melakukan amandemen pada UU Pekerja Anak tahun 2016 ternyata perubahan tersebut membawa UU yang diamandemen menjadi lebih sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No.138, hal inilah yang mendorong Pemerintah India untuk meratifikasi konvensi (ILO, 2017).

Ratifikasi Konvensi No.138 menjadikan India akan selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan penghapusan pekerja anak karena akan mengikat secara hukum untuk mematuhi ketentuan konvensi tersebut. Adanya ratifikasi Konvensi No.138 mendorong India untuk turut bergabung dengan sebagian besar negara yang telah mengadopsi Undang-Undang untuk membatasi dan melarang pekerjaan anak-anak secara ketat (Ministry of Labour & Employment, Government of India, 2023). India sepenuhnya yakin bahwa undang-undang serta praktik di negara tersebut sudah sesuai dan relevan dengan konvensi ILO yang mereka ratifikasi. Tujuan utama dibentuknya Konvensi ILO No.138 adalah untuk penghapusan pekerja anak yang efektif, yaitu pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak baik pekerjaan yang mengganggu wajib belajar ataupun pekerjaan bagi mereka yang terlalu muda (ILO, 2018). Salah satu metode paling efektif untuk memastikan

³ Undang-Undang Amandemen Pekerja Anak (Larangan & Peraturan), 2016 merupakan amandemen dari Undang-Undang (Larangan dan Peraturan) Pekerja Anak, 1986. Amandemen ini melarang mempekerjakan anak usia 6-14 tahun dalam bentuk pekerjaan atau proses apapun dengan dua pengecualian; membantu keluarga atau usaha keluarga jika pekerjaan tidak berbahaya dan dilakukan setelah jam sekolah atau selama liburan, dan bekerja sebagai seniman di industri audio-visual (iklan, film, serial tv, atau dalam kegiatan selain sirkus). Amandemen ini juga mengatur rehabilitasi anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal dan membentuk Dana Rehabilitasi Pekerja Anak, dibandingkan dengan UU tahun 1986 amandemen ini menetapkan hukuman yang lebih ketat bagi mereka yang mempekerjakan anak-anak di usia yang telah ditetapkan.

bahwa anak-anak tidak bekerja di usia yang terlalu muda adalah dengan menetapkan usia di mana anak bisa dipekerjakan secara legal, oleh karena itu ILO mewajibkan negara dengan menetapkan usia minimum untuk bekerja. Konvensi ini menjadi salah satu upaya Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) dalam memerangi pekerja anak.

International Labour Organization (ILO) merupakan organisasi yang melindungi hak-hak pekerja juga turut andil dalam menangani permasalahan pekerja anak di India. India merupakan salah satu negara pendiri ILO yang sudah menjadi anggota tetap Badan Pimpinan ILO sejak tahun 1922 dan Portofolio ILO di India saat ini adalah berfokus pada pekerja anak (ILO). Prinsip pertama ILO adalah perdamaian melalui keadilan sosial yang menjadi kontrak sosial global dan menggantikannya sebagai norma dasar (*grundnorm*) hukum internasional (McGaughey, 2021). ILO mendefinisikan pekerja anak sebagai anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan, membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik dan mental anak, serta pekerjaan yang secara moral atau sosial tidak layak untuk anak (ILO, 2020). ILO menetapkan usia minimum untuk bekerja pada usia 15 tahun, namun di beberapa negara berkembang usia minimum dapat diturunkan menjadi 14 tahun. Hal ini juga berlaku di India yang mana telah menetapkan usia minimum untuk pekerja di usia 14 tahun dalam Undang-Undang Amandemen Pekerja Anak (Larangan & Peraturan) Tahun 2016.

Kendati demikian, nampaknya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di bawah usia minimum masih belum berhasil. Faktanya meskipun telah ditetapkan aturan dan larangan resmi serta adanya konvensi internasional mengenai batasan usia minimum yang diperbolehkan bekerja, angka pekerja anak di bawah usia 14 tahun masih cukup tinggi meskipun angka anak yang pergi ke sekolah lebih banyak sebesar 90,7% namun tetap saja hal ini menunjukkan bahwa pekerja anak di India masih ada (UNESCO Institute of Statistics, 2023).

Menurut data peninjauan pekerja anak ilegal oleh NSSO, pada tahun 2021 India masih menjadi negara dengan jumlah pekerja anak di bawah umur dengan angka yang cukup besar, tercatat sebanyak 3,2 juta anak dengan kelompok usia 5-14 tahun atau sekitar 1,4% dari total populasi anak di India masih bekerja (National Sample Survey Organization (NSSO), 2022). Pada tahun 2021 di India ditemukan anak-anak berusia 5-14 tahun yang bekerja di berbagai sektor seperti pertanian sebanyak 56,4%, industri 33,1% dan jasa 10,4% (U.S Department of Labour, 2021). Hal ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Tabel 1. 2 Presentase Pekerja Anak di India Berdasarkan Sektor, Rentang Usia 5-14 Tahun (2021)



Sumber : (U.S. Department of Labor Organization, 2021)

Berdasarkan diagram di atas maka dapat dikatakan bahwa pemerintah India masih belum bisa mengatasi permasalahan pekerja anak di bawah usia 14 tahun. India telah menyetujui dan meratifikasi ketentuan ILO tersebut maka seharusnya tidak ada lagi pekerja anak di bawah usia yang telah ditentukan, apabila masih ada pekerja anak di bawah usia minimum dapat dikatakan bahwa India tidak patuh terhadap ketentuan ILO. Salah satu sektor yang masih ditemukan pekerja anak adalah pada sektor industri terbesar di India yaitu industri garmen sebagai penyumbang devisa ekspor tertinggi yang nantinya hasil produk dari industri tersebut akan di ekspor ke negara-negara lain. Sebagai salah satu negara penghasil garmen tertua di dunia yang telah ada sejak beberapa abad lalu industri garmen sudah menunjukkan eksistensinya di India, India dikenal memiliki kain yang khas dan telah mendunia.

Industri garmen menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di India

yang mempekerjakan 45 juta orang dan menyumbang seperlima atau sekitar 13% dari total pendapatan ekspor, serta berkontribusi terhadap 4% dari total PDB (Ministry of Textiles, 2015). India menjadi salah satu negara eksportir garmen utama yang tidak bergantung pada impor dalam beberapa dekade terakhir dan semakin terintegrasi ke dalam rantai pasokan garmen global (ILO, 2017). Dibalik kesuksesan industri garmen di India terdapat fenomena pekerja anak ilegal yang terlibat. Ketidakpatuhan India terhadap konvensi ILO mengenai batas usia minimum untuk pekerja dapat dikatakan apabila angka pekerja anak di bawah usia 14 tahun masih ada. Pada tahun 2017 setelah India meratifikasi konvensi ILO No.138 pekerja anak di bawah usia minimum dalam industri garmen di India masih ditemukan sampai pada tahun 2023. Pada tahun 2018-2019 jumlah pekerja anak kelompok usia 5-14 tahun di industri garmen India cukup besar meskipun angka pastinya bervariasi dikarenakan kasus pekerja anak ini bersifat tersembunyi dan informal, namun berdasarkan laporan Pusat Sumber Daya Bisnis & Hak Asasi Manusia, jumlah total pekerja anak di India sekitar 8,2 juta yang sebagian besarnya terlibat dalam industri garmen (FEMNET, 2019). Menurut data Biro Urusan Perburuhan Internasional (2022) mengenai daftar negara yang memproduksi barang hasil dari pekerja anak yang melanggar standar internasional, salah satunya adalah India dalam produk garmen. Sebagian besar anak berusia antara 8-17 tahun yang terpaksa memproduksi garmen di India dan berdasarkan data terbaru dari LSM terdapat 100.000 anak dari berbagai daerah di India yang dipaksa untuk memproduksi pakaian (Bureau of International Labor Affairs, 2022).

Topik ini kemudian menjadi cukup menarik untuk mengetahui apa yang menyebabkan ketidakpatuhan India terhadap Konvensi ILO No.138 dengan masih adanya pekerja anak di bawah usia minimum yang diperbolehkan bekerja pada industri garmen? Oleh karena itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut apa sekiranya yang menjadi faktor ketidakpatuhan tersebut. Dengan ini penulis mengambil judul **“Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan ILO Mengenai Pekerja Anak Dalam**

Industri Garmen di India”.

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun Pemerintah India sudah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional mengenai usia minimum yang diperbolehkan bekerja. Namun implementasinya di India masih banyak ditemukan kasus pekerja anak di bawah usia minimum, salah satunya adalah pada industri garmen. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu **Mengapa India tidak patuh terhadap Ketentuan ILO mengenai pekerja anak di bawah usia minimum khususnya dalam industri garmen?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan Pemerintah India terhadap Ketentuan ILO mengenai pekerja anak di bawah usia minimum yang telah ditetapkan untuk bekerja khususnya dalam industri garmen di India.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian serta penulisan ini diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut :

2.2.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai referensi atau sumber rujukan dalam studi Hubungan Internasional yang menjelaskan terkait ketidakpatuhan India dalam menaati aturan batasan usia minimum untuk pekerja pada Konvensi ILO No.138 dalam kasus pekerja anak khususnya di industri garmen India.

2.2.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi dasar dan landasan untuk pengembangan bagi penelitian lain yang terkait denganketidakpatuhan India terhadap Konvensi ILO No.138 dalam menangani kasus pekerja anak di bawah usia minimum pada industri garmen di India.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konsep

2.1.1 Rezim Internasional

Rezim internasional didefinisikan sebagai prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi aktor bertemu dalam suatu area isu tertentu (Krasner, 1983). Krasner juga mendefinisikan bahwa “*Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision-making procedurs around which actors expectations converge in a given area of international relations*” (1983, hal. 2).

Penjelasan mengenai prinsip (*principles*) adalah keyakinan akan fakta, sebab-akibat dan kejujuran. Norma (*norms*) yaitu standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Aturan (*rules*) diartikan sebagai resep atau larangan khusus bertindak. Lalu prosedur pengambilan keputusan (*decision-making procedurs*) merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif. Dalam penjelasan rezim internasional menurut Krasner dikatakan bahwa rezim internasional mempunyai kekuatan untuk mengatur perilaku negara. Krasner mengatakan bahwa rezim harus diketahui sebagai sesuatu yang lebih dari pengaturan sementara (*temporary arrangements*) yang dapat berubah pada setiap pergantian kekuasaan (*power*) atau kepentingan (*interests*).

Rezim seperti yang didefinisikan Krasner (1983) merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur di mana harapan para aktor bertemu, hal ini berfungsi untuk menyalurkan tindakan politik dalam suatu sistem dan memberinya manfaat (David, 1957). Rezim membatasi dan mengatur perilaku peserta, mempengaruhi isu mana di antara tokoh utama yang masuk dan keluar agenda, menentukan kegiatan mana yang dilegitimasi

atau dikecam serta mempengaruhi bagaimana dan kapan konflik diselesaikan (Puchala & Hopkins, 1983). Menurut Puchala & Hopkins (1983) terdapat lima karakteristik utama dalam fenomena rezim, diantaranya adalah :

1. Rezim adalah fenomena sikap. Yaitu perilaku mengikuti kepatuhan terhadap prinsip, norma, atau aturan yang tercermin dalam kode hukum. Tetapi rezim sendiri bersifat subyektif, sikap seperti ini mungkin ada kaitannya dengan sistem kegiatan yang saling bergantung secara fungsional dan berpusat di wilayah geografis.
2. Rezim internasional mencakup prinsip-prinsip tentang prosedur yang tepat untuk membuat keputusan. Dalam hal ini mengidentifikasi rezim tidak hanya dengan norma substantif utama, tetapi juga dengan norma luas yang menetapkan prosedur dimana aturan atau kebijakan tercapai.
3. Deskripsi suatu rezim harus mencakup karakterisasi prinsip-prinsip utama yang dijunjungnya, serta norma-norma yang mengatur ortodoks dan melarang perilaku menyimpang. Hal ini sangat berguna untuk memperkirakan hierarki di antara prinsip-prinsip dan prospek penegakan norma.
4. Setiap rezim memiliki sekumpulan elit yang merupakan aktor praktis di dalamnya. Pemerintah negara atau bangsa adalah anggota resmi utama dari sebagian besar rezim internasional. Para partisipan rezim seringkali adalah unit birokrasi atau individu yang beroperasi sebagai bagian dari pemerintahan subsistem internasional dengan menciptakan, menegakkan, atau bertindak sesuai dengan norma-norma.
5. Suatu rezim ada di setiap area isu substantif dalam hubungan internasional dimana ada perilaku yang tersusun dengan jelas. Dimana pun ada perilaku keteraturan dalam perilaku maka beberapa prinsip, norma, atau aturan harus ada untuk menjelaskannya. Bukti dari beberapa perilaku yang ditentukan secara normatif tetap akan mengkonfirmasi keberadaan rezim betapapun lemahnya rezim tersebut.

Definisi yang dikemukakan oleh Haggard & Simmons (1987) memiliki penjelasan berbeda mengenai rezim internasional yang digunakan sebagai kesepakatan multilateral di antara negara-negara yang bertujuan untuk mengatur tindakan nasional dalam suatu area isu. Rezim menginterpretasikan berbagai tindakan negara yang diizinkan tersebut dengan memaparkan perintah eksplisit. Definisi rezim memiliki perbedaan dengan konsep kerjasama, rezim merupakan contoh dari bagian adanya kerjasama namun kerjasama tidak dapat terjadi tanpa adanya rezim yang stabil. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Haggard & Simmons bahwa “*Regimes are examples of cooperative behavior and facilitate cooperation, but cooperation can take place in absence of established regimes*” (1987, hal. 495).

Namun rezim tidak selalu berjalan dengan stabil, rezim dapat berubah dari waktu ke waktu atau dapat bervariasi pada seluruh kasus. Setidaknya ada empat cara menurut Haggard & Simmons (1987, hal. 496-498) yang dapat mempertahankan rezim agar stabil :

1) Kekuatan (*Strength*)

Penyebab kekuatan rezim melemah atau membusuk dapat diukur dengan tingkat kepatuhan terhadap perintah rezim, khususnya pada kasus kepentingan pribadi bertabrakan dengan aturan rezim.

2) Bentuk Organisasi (*Organizational Form*)

Sebagian besar rezim cenderung memiliki setidaknya beberapa perangkat administratif. Tugas kooperatif yang kompleks membutuhkan struktur organisasi yang lebih terperinci dan berisafit otonom.

3) Ruang Lingkup (*Scope*)

Maksud ruang lingkup dalam hal ini adalah mengacu pada berbagai isu yang dicakup oleh rezim. Salah satu penyebab penting perubahan rezim adalah eksternalitas yang diasosiasikan dengan ruang lingkup yang tidak memadai.

4) Mode Alokasi (*Allocational Mode*)

Rezim dapat mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya. Sifat dari area isu dan tingkat kerjasama yang dicari, sebagian akan menentukan preferensi untuk mode alokasi yang berorientasi pada pasar atau mode alokasi otoritatif. Namun, banyak area isu dapat diatur dengan cara yang sama dengan konsekuensi distribusi yang sangat berbeda.

2.2 Kerangka Teori

Non-Compliance Theory

Ketidakpatuhan tidak selalu berfokus pada pelanggaran yang disengaja atau perilaku kriminal terhadap norma-norma internasional, namun dapat juga dikarenakan kurangnya sumber daya, ketidaktahuan dan perlunya peningkatan kapasitas, ada banyak hal yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan (Cameron, Werksman, & Roderick, 1996). Ketidakpatuhan yang dimaksud dalam teori ini adalah ketika suatu negara tidak mematuhi atau menjalankan kewajiban seperti aturan atau perjanjian internasional ataupun norma internasional. Mitchell menjelaskan bahwa *“The term “compliance” is commonly applied in comparing behavior to specific treaty provisions, a treaty’s broader spirit and principles, implicit international norms, informal agreements and even tacit agreements”* (1996, hal. 5).

Menurut Ronald B. Mitchell kepatuhan (*compliance*) didefinisikan sebagai suatu aktor atau institusi internasional dan negara yang bersepakat terhadap suatu perjanjian ataupun aturan yang telah disepakati, baik yang bersifat implisit maupun eksplisit seperti norma internasional. Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Mitchell, dapat dipahami bahwa apabila suatu negara tidak mematuhi perjanjian ataupun aturan yang telah disepakati maka negara tersebut dianggap tidak patuh.

Ada beberapa alasan ketidakpatuhan suatu negara terhadap perjanjian yang telah disepakati terutama dalam hal kerjasama. Selain dengan melanggar aturan perjanjian yang telah diberikan, Ronald B. Mitchell (1996, hal. 11) menyampaikan

terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan yaitu ketidakpatuhan sebagai preferensi, ketidakpatuhan karena ketidakmampuan, ketidakpatuhan karena ketidaksengajaan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketidakpatuhan sebagai preferensi (*non-compliance as preference*)

Preferensi dalam konteks ini ditafsirkan sebagai hak untuk atau ingin diutamakan dan didahulukan daripada yang lain, dengan kata lain diprioritaskan (KBBI). Preferensi ini menjadi salah satu alasan apakah suatu negara akan mematuhi atau tidak terhadap perjanjian atau aturan internasional yang telah disepakati. Seorang aktor atau negara mungkin lebih memilih tidak patuh hanya karena melihat dari manfaat kepatuhan. Dalam artian apakah nanti jika mereka mematuhi akan mendapat untung yang lebih besar dari biayanya atau justru memberatkan negara itu sendiri, inilah yang menjadi preferensi negara dalam memutuskan akan menjadikan perjanjian tersebut suatu kepentingan atau tidak.

Ketidakpatuhan suatu negara ini juga tidak semata-mata timbul, melainkan karena beberapa alasan tertentu. Salah satunya adalah adanya kepentingan politik seperti di beberapa kasus negara memang dari awal tidak ada maksud untuk mematuhi suatu perjanjian, mereka menandatangani perjanjian hanya untuk mengambil keuntungan dan mengumpulkan manfaat politik dari keanggotaan perjanjian tersebut. Alasan lain yang menyebabkan ketidakpatuhan negara sebagai preferensi ini dengan adanya pemaksaan (*koersif*) atau tekanan yang kuat dari domestik ataupun internasional untuk menandatangani suatu perjanjian tanpa memedulikan biaya kepatuhan yang disanggupi oleh negara tersebut atau tidak.

2. Ketidakpatuhan karena ketidakmampuan (*non-compliance due to incapacity*)

Meskipun suatu negara menganggap kepatuhan sebagai hal yang bermanfaat, namun apabila kurangnya sumber daya yang dibutuhkan maka negara tersebut akan tetap gagal dalam mematuhi. Pelanggaran dapat disebabkan oleh

ketidakmampuan finansial, administratif atau teknologi, serta keengganan untuk mematuhi. Ketidakpatuhan karena alasan tersebut banyak ditemukan di negara-negara berkembang, yang mana pemerintah negara berkembang mungkin tidak mematuhi suatu perjanjian karena kurangnya konstituen domestik atau karena masalah yang lebih mendesak seperti tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi biaya kepatuhan. Seperti halnya ada kewajiban bagi suatu negara untuk menggunakan teknologi tertentu yang mengharuskan negara tersebut mengeluarkan biaya yang cukup tinggi.

Kurangnya kapasitas administratif suatu negara dapat mengakibatkan ketidakmampuan negara tersebut untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, nilai-nilai lokal yang berlaku di suatu negara juga menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional, karena terkadang aturan atau perjanjian tersebut dianggap bertentangan dengan kearifan lokal setempat. Dilihat dari beberapa faktor penyebab ketidakmampuan negara dalam mematuhi perjanjian dapat disimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah karena kurangnya kapabilitas negara itu sendiri.

3. Ketidakpatuhan karena ketidaksengajaan (*non-compliance due to inadvertence*)

Ketidaksengajaan disini adalah ketika suatu negara atau aktor telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan, hal ini sering disamakan dengan *good faith non-compliance*. Suatu negara sudah berinisiatif mengambil tindakan untuk mencapai kepatuhan, namun gagal memenuhi standar perjanjian karena suatu faktor dalam ketidaksengajaan. Masalah ini tidak terbatas pada negara-negara berkembang saja, negara maju sekalipun juga dapat mengalami kelengahan. Program atau perjanjian internasional yang membuat suatu negara patuh mungkin gagal mendapatkan hasil yang sama di negara lain, semua kembali pada bagaimana aktor negara ini menyikapinya. Jadi ketidakpatuhan karena ketidaksengajaan ini berbeda dari

ketidapatuhan karena dua faktor diatas, dalam hal ini ketidapatuhan disebabkan oleh kesalahan negara itu sendiri yang lengah dalam penerapan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Literatur utama yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini ditulis oleh Dila Yuliani dan Eka Kurniasari pada tahun 2018 dengan judul *The Protection of Child Labour in India*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol. 2 (2), 299-311, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Tujuan penelitian Wandi Abbas untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum hak anak di India serta kendala yang dihadapi pemerintah India dalam menangani pekerja anak di India. Dila dan Eka mengemas seluruh cakupan pembahasan dengan ringkas dan jelas sehingga pembaca akan cepat mencerna poin penting dalam permasalahan utama pada jurnal tersebut. Akan tetapi dalam jurnal tersebut kurang menjelaskan secara rinci terkait hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah India dalam proses penanganan eksploitasi anak di India dan hanya berfokus pada perlindungan hukum pekerja anak di India. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya dengan lebih berfokus pada pembahasan mengenai alasan ketidapatuhan pemerintah India terhadap pekerja anak di bawah batas usia minimum dalam Konvensi ILO No.138.

Pada literatur kedua penulis menggunakan skripsi yang ditulis oleh Fandy Tamara pada tahun 2020 dan merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Skripsi Fandy Tamara berjudul *Politik Kebijakan Pemerintah India Tahun 2010-2018*. Pada skripsi yang ditulis oleh Fandy Tamara dengan penelitian ini memiliki persamaan topik pembahasan, yakni mengenai pekerja anak di India yang masih di bawah usia 14 tahun. Namun dalam penelitian kedua Tamara akan berfokus pada alasan Pemerintah India tetap mengizinkan anak di bawah usia 14 tahun bekerja terutama pada sektor informal. Dalam penulisan pada penelitiannya Tamara sudah

cukup bagus dan jelas ditambah lagi penelitian ini menampilkan alternatif kebijakan yang digunakan oleh pemerintah India untuk menangani kasus pekerja anak. Maka, pada penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya terkait dengan penyebab masih adanya pekerja anak di India di bawah batas usia minimum dengan mengaitkan pada Konvensi ILO No.138.

Selanjutnya, literatur ketiga yang penulis gunakan adalah skripsi yang berjudul *Analisis Alasan India Meratifikasi Convention International Labour Organization (ILO) No.138 Tentang Child Labour Dalam Industri Garmen*. Skripsi ini ditulis oleh Husni Nanda Pratiwi pada tahun 2023 yang merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Terdapat persamaan dalam skripsi Pratiwi dengan penelitian ini yakni membahas mengenai Konvensi ILO No.138 di India terkhususnya pada industri garmen. Dalam penelitian ketiga ini Pratiwi sudah mengemas seluruh pembahasan dengan cukup rinci, namun yang menjadi perbedaan skripsi Pratiwi dengan penelitian ini adalah dalam penelitiannya Pratiwi memfokuskan pada penyebab pemerintah India baru meratifikasi Konvensi ILO No.138 pada tahun 2017. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada penyebab ketidakpatuhan pemerintah India terhadap Konvensi ILO No.138 mengenai usia batasan minimum pada kasus pekerja anak di industri garmen di India.

2.4 Ringkasan Penerapan Teori

Konvensi ILO merupakan suatu rezim internasional yang mengatur negara-negara anggotanya untuk menetapkan usia minimum yang diperbolehkan bekerja. India menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO No.138, namun terdapat fenomena bahwa masih adanya pekerja anak di bawah usia minimum. Pada dasarnya negara-negara yang turut meratifikasi sudahsepatutnya patuh terhadap rezim internasional sedangkan pada kasus di Indiaini masih mempraktikkan pekerja anak di bawah usia minimum, sehingga berlawanan dengan rezim ILO yang menetapkan kebijakan tersebut. Rezim internasional digunakan untuk menjelaskan

tentang fenomena sikap, yang diartikan sebagai perilaku mengikuti kepatuhan terhadap prinsip, norma atau aturan yang tercermin dalam kode hukum. Dalam hal ini India bertentangan dengan perilaku yang seharusnya patuh terhadap aturan yang sudah tercantum pada rezim internasional yaitu konvensi ILO No.138.

Mengacu pada teori ketidakpatuhan bahwa apabila suatu negara tidak mematuhi perjanjian ataupun aturan yang telah disepakati maka negara tersebut dianggap tidak patuh. Jika dilihat dari perspektif permasalahan yang terjadi pada kasus ini, maka dapat dikatakan bahwa adanya ketidakpatuhan dari India terhadap rezim ILO No.138. Fakta bahwa dengan adanya ketidakpatuhan dari negara India terhadap suatu rezim internasional, maka penulis menggunakan teori ketidakpatuhan (*non-compliance theory*) yang berfungsi untuk menganalisis mengapa India tidak mematuhi Konvensi ILO No.138 mengenai pekerja anak di bawah usia minimum untuk bekerja terkhususnya dalam industri garmen. Ketidakpatuhan tidak selalu berfokus pada pelanggaran yang disengaja atau perilaku kriminal terhadap norma-norma internasional, namun dapat juga dikarenakan kurangnya sumber daya, ketidaktahuan dan perlunya peningkatan kapasitas, ada banyak hal yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Penulis akan menganalisis ketidakpatuhan India terhadap rezim internasional dengan menggunakan ketiga faktor ketidakpatuhan suatu negara. Ketidakpatuhan India dapat ditinjau berdasarkan pada *non-compliance theory* yakni ketiga faktor penyebab suatu negara tidak patuh karena adanya ketidakpatuhan sebagai preferensi; ketidakpatuhan karena adanya ketidakmampuan terutama dalam kurangnya sumber daya yang dibutuhkan seperti finansial, administratif atau teknologi; dan yang ketiga adalah ketidakpatuhan karena ketidaksengajaan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuasi-kualitatif, atau biasa disebut dengan kualitatif semu. Tujuan utama dari metode penelitian kuasi-kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa secara objektif (Cropley, 2021). Pendekatan kuasi kualitatif masih memungkinkan untuk menggunakan teori sebagai alat penelitian. Sehingga pendekatan ini berbeda dengan kualitatif murni karena dalam penelitiannya kuasi-kualitatif masih menggunakan teori di dalamnya. Persamaan pendekatan kuasi kualitatif dengan kualitatif murni adalah sama-sama menitikberatkan kesertaan peneliti di dalamnya (Creswell, 2008). Pada pendekatan kuasi- kualitatif, nilai-nilai, gagasan, serta *mindset* peneliti akan memberi pengaruh pada hasil analisis. Penelitian dengan pendekatan ini akan mengutamakan pada pemahaman yang mendalam pada suatu isu yang ada dalam penelitian, maka uraian mengenai kejadian atau kasus yang terjadi dapat dideskripsikan secara mendetail.

3.2 Objek dan Fokus Penelitian

Objek dan fokus perlu ditetapkan dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk menjaga pemfokusan pada objek permasalahan yang penulis angkat dan agar tidak meluas pada topik pembahasan yang lain. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah ancaman eksploitasi pekerja anak di bawah umur dari aktivitas ilegal industri garmen di India. Dengan demikian, fokus dalam penelitian ini mengarah kepada penyebab masih terjadinya pekerja anak di bawah umur dalam industri garmen India. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan melihat upaya yang telah dilakukan pemerintah India untuk menghapus pekerja anak khususnya pada industri garmen.

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu batasan materi dan batasan waktu. Batasan materi ditujukan untuk menentukan

lingkup pembahasan suatu isu yang akan diteliti serta membatasi agar topik yang dibahas oleh peneliti tidak melebar dan keluar dari fokus utamanya. Pada penelitian ini, penulis akan memberikan batasan materi pada penyebab ketidakpatuhan pemerintah India terhadap Konvensi ILO No.138 mengenai batasan usia minimum pekerja anak. Sedangkan batasan waktu ditujukan untuk menentukan rentang waktu terjadinya suatu isu yang akan diteliti. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2017-2023, yang mana pada tahun 2017 digunakan sebagai batasan awal mula penelitian ketika pemerintah India meratifikasi Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum untuk bekerja dengan usia minimum yang ditentukan untuk diperbolehkan bekerja adalah usia 14 tahun dan tahun 2023 digunakan sebagai acuan batasan akhir karena upaya pemerintah India dalam menangani praktik pekerja anak ilegal belum berhasil dengan masih ditemukannya kasus pekerja anak di bawah usia 14 tahun di industri garmen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, dengan sumber data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari serta memahami terkait topik yang berhubungan dengan penelitian ini dan didapat dari berbagai literatur. Peneliti menggunakan sumber data sekunder, untuk mengetahui alasan pemerintah India tidak patuh terhadap Konvensi ILO No.138 yang sudah diratifikasi. Dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, diantaranya melalui :

1. Jurnal
2. Buku
3. Buku elektronik (*e-book*)
4. Berita daring
5. Perpustakaan nasional daring
6. Laman resmi pemerintah
7. Situs internet

3.4 Keabsahan Data

Untuk memastikan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu adanya keabsahan data. Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber menguji keabsahan data dengan melakukan klasifikasi dan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber (Winarni, 2018, p. 184). Untuk mengecek kredibilitas data pada teknik triangulasi ini dengan cara mengecek pada sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik yang berbeda (Winarni, 2018, p. 195). Tujuan triangulasi sumber dengan menggunakan data yang didapat dari beberapa penelitian sebelumnya adalah untuk membandingkan dan menemukan berbagai sudut pandang serta fakta-fakta yang dapat membantu peneliti mencapai tujuan penelitian.

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan istilah dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk kajian yang bersifat deskriptif, umumnya jenis penelitian ini dilakukan pada fenomenologi sosial (Polit & Beck, 2009). Dalam analisis deskriptif kualitatif diutamakan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian yang terpaut dengan pertanyaan apa, mengapa, dimana, siapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi untuk dikaji secara meluas, guna menemukan pola-pola yang muncul dalam peristiwa tersebut (Kim, Sefcik, & Bradway, 2016).

Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif. Dalam proses analisis data terdapat tiga tahapan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Miles & Huberman (1994) bahwa *“we define analysis as consisting of three concurrent flows of activity: data reduction, data display, and conclusion drawing & verification”*. Adapun penjelasan lebih dalam terkait ketiga tahapan model analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul dalam transkripsi. Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, menyortir, memfokuskan pada data yang relevan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengumpulkan data sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi. Sehingga yang dimaksud reduksi data disini adalah dengan mengubah data melalui banyak cara yaitu dengan menyeleksi data, meringkas atau parafrase dan dimasukan pada pola yang lebih luas. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data dari studi literatur dan mencari data baru yang sesuai untuk dapat memperkuat bukti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terstruktur dan memungkinkan penarikan kesimpulan serta tindakan. Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif berupa teks yang diperluas atau bersifat naratif. Jalan utama menuju analisis kualitatif yang valid, maka perlu untuk menyajikan data yang lebih baik. Tidak hanya berupa teks naratif saja, namun juga dapat dilengkapi dengan matriks, grafik, bagan ataupun jaringan. Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan setelah data direduksi dan akan dijabarkan dalam bentuk teks eksplanasi yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahapan analisis data yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian kualitatif akan lebih baik berupa bentuk pembaharuan sebagai pelengkap dari data terdahulu yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil dari hipotesis dalam penyajian data yang sudah terbukti verifikasi.

3.6 Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Pendahuluan disini berisikan penjelasan secara ringkas mengenai apa yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Diiringi dengan rumusan masalah sebagai bentuk pengantaran hasil dari penelitian ini, serta adanya pemaparan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdapat kerangka teori dan konsep sebagai acuan pustaka, selain itu dalam bab ini terdapat tinjauan penelitian terdahulu dalam bentuk teks naratif singkat, serta terdapat ringkasan penerapan teori dari teori yang digunakan oleh penulis.

Bab 3. Metodologi Penelitian

Bab ini akan menguraikan mengenai pendekatan penelitian, objek dan fokus penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, keabsahan data, analisis data serta sistematika penulisan penelitian ini.

Bab 4. Fenomena Pekerja Anak di Industri Garmen dan Analisa Ketidakpatuhan India Pada Aturan ILO

Bab ini akan menjelaskan mengenai fenomena pekerja anak pada industri garmen di India dan menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan India dalam mematuhi Ketentuan ILO mengenai pekerja anak di bawah usia minimum pada industri garmen, lalu dalam bab ini juga akan memaparkan terkait permasalahan kegagalan India dalam mematuhi ketentuan ILO berdasarkan *Non- Compliance Theory*.

Bab 5. Kesimpulan

Bab ini berisi simpulan dari sudut pandang penulis mengenai topik pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB 4. FENOMENA PEKERJA ANAK DI INDUSTRI GARMEN DAN ANALISA KETIDAKPATUHAN INDIA PADA ATURAN ILO

4.1 Kondisi Pekerja Anak Pada Industri Garmen di India

Anak memiliki hak yang sudah seharusnya terpenuhi. Hak asasi anak bahkan diakui secara universal dan tercantum dalam Deklarasi ILO tahun 1944 Philadelphia yang menegaskan pentingnya hak asasi manusia bagi semua orang dan dalam Deklarasi Piagam Bangsa-Bangsa tahun 1959 tentang Hak Anak (Krisnawati, 2005). Mirisnya hak asasi anak belum berhasil diberlakukan di beberapa negara. Kasus yang paling sering ditemukan adalah adanya *child labour*, yang mana di beberapa negara anak-anak justru menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah pekerja anak atau *child labour* merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil anak serta potensi dan martabat anak, hal ini mengacu pada pekerjaan yang berbahaya secara mental, fisik, sosial, serta moral yang membahayakan anak, selain itu akan mengganggu kemampuan anak untuk bersekolah karena pekerjaan yang terlalu panjang dan berat (ILO, 2017). Penggunaan anak sebagai pekerja merupakan pelanggaran hak anak karena tenaga anak-anak dieksploitasi yang akan mempengaruhi pada perkembangan fisik dan mental mereka. Hak anak yang seharusnya bermain dan belajar terampas dengan bekerja karena paksaan dari lingkungan eksternal.

India merupakan salah satu negara di Asia Selatan dengan angka pekerja anak tertinggi yaitu mencapai 5,8 juta anak lalu diikuti oleh Bangladesh 5 juta anak, Pakistan 3,4 juta anak dan Nepal 2 juta anak, sebanyak 10,3 juta di antaranya adalah anak-anak dengan rentang usia 5-11 tahun (ILO, 2020). Adanya Undang-Undang yang melarang anak berusia di bawah 14 tahun untuk bekerja di sebagian besar sektor industri, India tetap memiliki angka yang tinggi pada kasus pekerja anak di usia 5-14 tahun yakni antara 40-115 juta pekerja anak (Venkateswarlu, Kasper, Mathews, & Reis, 2003). Pada tahun 2023 masih ditemui sebanyak 3 juta (1,4%)

anak yang masih dipekerjakan, meskipun angka anak yang pergi ke sekolah lebih banyak sebesar 90,7% namun tetap saja hal ini menunjukkan bahwa pekerja anak di India masih ada (UNESCO Institute of Statistics, 2023). Tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak diklasifikasikan sebagai pekerja anak, pekerja anak merujuk pada pekerjaan yang dilakukan anak-anak di bawah usia kerja minimum yang sah dan telah ditentukan. Penetapan usia minimum untuk bekerja harus sesuai berdasarkan standar ILO mengenai pekerja anak yang tercantum dalam Konvensi Usia Minimum ILO 1973, No.138. India telah menyetujui dan meratifikasi ketentuan ILO tersebut maka seharusnya tidak ada lagi pekerja anak di bawah usia yang telah ditentukan, apabila masih ada pekerja anak di bawah usia minimum dapat dikatakan bahwa India tidak patuh terhadap ketentuan ILO.

India memiliki keunggulan dalam produksi garmen karena kainnya yang terkenal dengan kualitasnya yang bagus hal ini dikarenakan India adalah salah satu produsen utama kapas di dunia yang memberikan keuntungan dalam hal akses langsung ke bahan baku berkualitas, serta kain dari India terkenal memiliki ciri khas keahlian dalam teknik tenun dan bordir tradisional memberikan keunikan dan nilai tambah pada produk-produk garmen India (FEMNET, 2019). Produksi garmen untuk ekspor di India sebagian besar berbasis di sejumlah pusat produksi yang tersebar di seluruh negeri, yang mana setiap kelompok mengkhususkan pada produk tertentu dan memiliki komposisi sosial tenaga kerja yang khas (Mezzadri, 2014). Industri tekstil di India menyumbang sebesar US\$ 64,41 miliar pada akhir Maret 2017 (Ministry of Textiles, 2015) dan mencapai sekitar \$223 miliar pada tahun 2021 (Sekhon, 2017). Industri garmen India terkenal memiliki kemampuan untuk memproduksi dalam skala besar, memenuhi kebutuhan pasar domestik serta internasional dan dengan segala keunggulan kain yang mereka miliki, India memiliki biaya tenaga kerja yang relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara lain, hal inilah yang memungkinkan produksi garmen dengan biaya lebih efisien (FEMNET, 2019). Namun dari sekian keunggulan yang dimiliki oleh industri tersebut ini

merupakan mimpi buruk bagi para pekerjanya, alasan mengapa biaya produksi garmen di India jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain karena mereka menggunakan pekerja anak illegal (di bawah usia 14 tahun) sebagai tenaga kerjanya dan mereka dipaksa untuk terus bekerja sehingga India dapat memproduksi garmen dalam skala besar.

Kondisi pekerja anak di India sangat memprihatinkan, rata-rata sektor garmen tidak memperlakukan para pekerja anak di industri ini dengan baik. Secara umum anak-anak akan dipekerjakan oleh para pengusaha karena mereka dapat diupah lebih rendah dari upah tenaga kerja sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pada awal tahun 2020 tingkat pengangguran untuk anak muda usia 15-24 tahun mengalami persentase kehilangan pekerjaan tinggi akibat dari pandemi, sampai pada tahun 2022 jumlah total pengangguran muda secara global diperkirakan mencapai 73 juta (ILO, 2022). Sekian banyak jumlah pengangguran pada kelompok usia yang diperbolehkan bekerja di India, para pengusaha dari industri garmen lebih memilih untuk mempekerjakan secara ilegal pada anak-anak di bawah usia minimum agar dapat diupah rendah. ILO bahkan telah meminta pada India untuk memastikan jumlah pekerja anak tidak meningkat karena banyaknya pendapatan keluarga yang menurun tajam sebagai akibat dari Pandemi COVID-19 (Mathur, 2020). Para pekerja anak seringkali terisolasi dengan tinggal di tempat kerja dan menghadapi pembatasan kebebasan bergerak. Perlakuan tersebut menyebabkan beberapa anak terpapar pewarna serta bahan kimia beracun tanpa alat pelindung dan ada pula pekerja anak yang dipaksa untuk lembur bahkan ketika mereka sedang sakit tanpa dibayar upah lembur. Anak-anak tersebut juga dipaksa untuk melakukan tugas seperti menjahit baju atau kancing, memotong, mewarnai dan menghiasi pakaian, bahkan ketika mereka sakit. Apabila para pekerja anak tidak melakukan tugasnya, maka mereka akan diancam dan dihukum dengan kekerasan verbal ataupun fisik, hukuman finansial dengan dibayar sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali untuk pekerjaan mereka, sampai bahkan beberapa anak secara rutin tidak diberi makan minum serta tidur.

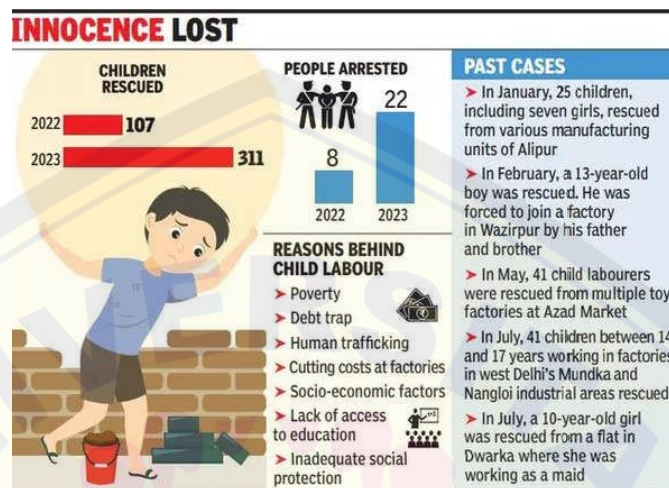


Gambar 4. 1 Kondisi Pekerja Anak Pada Industri Garmen di India

Sumber : (Ribhu & Agrawal, 2011)

Pekerja anak di industri garmen adalah bentuk angkatan kerja yang tidak terorganisir dan mirisnya fenomena ini berkembang pesat di India terutama di kota-kota penghasil ekspor garmen seperti ibu kota negara, Delhi. Delhi merupakan salah satu dari lima pusat produksi garmen di India bersama dengan Tirupur, Mumbai, Chennai dan Bangalore, yang mana setiap kota terkenal dengan spesialisasinya dalam jenis produksi garmen yang unik (Save the Children, 2015). Delhi dianggap sebagai salah satu “*industrial clusters*” dari industri garmen karena konsentrasi ekspor di ibu kota, yang mana sebagian besar industri garmen di Delhi didorong oleh ekspor terutama untuk pasar internasional. Negara ini menyumbang sekitar 60% dari seluruh ekspor garmen India (Ribhu & Agrawal, 2011), kendati begitu sangat disayangkan bahwa di balik suksesnya Delhi dalam membawa sektor garmen ke kancah internasional terdapat pelanggaran terhadap rezim internasional yang berlaku. Sebagian besar pekerja pada industri garmen di Delhi adalah anak-anak berusia 8-15 tahun yang dipaksa bekerja selama 10-15 jam dalam sehari di dalam pabrik yang tidak higienis, oleh sebab itu rata-rata pekerja anak tersebut mengalami masalah kulit dan mata karena terpapar bahan-bahan kimia (Singh, 2022). Jumlah pekerja anak di bawah umur yang diselamatkan di Delhi meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan ada tahun 2022, data kepolisian Delhi menunjukkan alasan anak-

anak di bawah umur dipekerjakan di Delhi antara lain karena kemiskinan, terlilit hutang, perdagangan manusia, faktor sosial-ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta perlindungan sosial yang tidak memadai (Singh, Child labour cases spike in Delhi, 2023). Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. 2 Data Pekerja Anak di Delhi

Sumber : (Singh, 2023)

Pekerja anak lainnya ditemukan di salah satu kota yang juga merupakan pusat penghasil garmen di India yaitu Tirupur, anak-anak tersebut bekerja sebagai pembantu di banyak unit subkontrak di Tirupur dan rata-rata pekerja anak tersebut berusia 8-14 tahun (the Association for Stimulating Know-How (ASK), 2010). Tirupur dikenal sebagai “*knitwear capital of India*” karena kota ini menyumbang sekitar 90% produksi garmen berupa pakian rajut katun India untuk diekspor (MSME, 2015). Produk garmen yang akan diekspor akan bersaing dengan pasar garmen dari berbagai negara dengan tawaran harga yang terjangkau, maka India mencari cara agar produk garmen yang dihasilkan jauh lebih murah dari harga di pasaran. Oleh karena itu beberapa industri garmen di Tirupur mencari keuntungan dengan mempekerjakan anak di bawah usia minimum pekerja agar dapat digaji di bawah upah harian pekerja dewasa. Pendapatan rata-rata yang diterima oleh para

pekerja anak dalam industri tersebut jauh di bawah upah harian pekerja dewasa yakni sekitar INR 15-30 per hari, sedangkan dalam satu hari para pekerja anak tersebut mendapat jam kerja berlebihan yang dapat mencapai 12-14 jam bahkan terkadang mencapai 18 jam sehari tanpa diberi hari libur (ILO, 2017). Korban pekerja anak di distrik Tirupur adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang dipaksa untuk bekerja di luar keinginan mereka, para orang tua memaksa anak-anak mereka yang berusia 12-15 tahun untuk bekerja di pabrik garmen swasta setempat. Pada masa Pandemi COVID-19 telah mendorong 60%-70% siswa menjadi pekerja anak di Tirupur, hal ini dikarenakan sekolah tutup selama *lockdown* (The Times of India, 2021). Dengan mengatasi isu pekerja anak, India dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anaknya, memperbaiki citra industri garmennya di mata dunia dan menciptakan kondisi kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun apabila isu ini terus dibiarkan maka dampak dan kerugian bagi India ataupun industri garmen itu sendiri akan cukup banyak (McCarthy, 2019), diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Kerugian Pendidikan:** Anak-anak yang bekerja cenderung putus sekolah atau memiliki akses pendidikan yang terbatas, yang berdampak negatif pada masa depan mereka serta akan mengancam para penerus bangsa India di masa yang akan datang.
2. **Masalah Kesehatan:** Pekerjaan di industri garmen sering kali melibatkan kondisi kerja yang berbahaya, yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental anak-anak.
3. **Siklus Kemiskinan:** Pekerja anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak cenderung tetap dalam siklus kemiskinan, karena mereka tidak memiliki keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.
4. **Dampak Sosial:** Eksploitasi anak-anak dalam pekerjaan berkontribusi pada masalah sosial yang lebih luas, termasuk peningkatan kriminalitas dan ketidakstabilan sosial.

5. **Citra Internasional:** Keberadaan pekerja anak dapat merusak citra internasional industri garmen India, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada ekspor dan hubungan perdagangan

4.2 **Analisa Yang Menyebabkan Ketidapatuhan India Terhadap Ketentuan ILO Berdasarkan *Non-Compliance Theory***

Kenyataan bahwa dengan masih adanya pekerja anak di bawah usia minimum yang sudah disepakati dalam Konvensi ILO No.138 telah membuktikan bahwa India belum bisa untuk mematuhi rezim internasional tersebut. Kegagalan India terhadap aturan pekerja anak di bawah usia minimum erat kaitannya dengan teori ketidapatuhan (*non-compliance theory*) yang diperkenalkan oleh Ronald B. Mitchell (1996). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab ketidakefektifan kebijakan pemerintah India dalam memberantas pekerja anak, faktor-faktor ini lah yang menjadi kendala bagi India untuk mematuhi konvensi internasional ILO. Teori ketidapatuhan akan digunakan sebagai pisau analisa dalam mengkaji kegagalan India dalam mematuhi konvensi internasional ILO yang telah disepakati dengan mengimplementasikan ketiga jenis ketidapatuhan yang ada dalam teori ketidapatuhan Mitchell dan mengaitkan dengan kasus pekerja anak di India, sehingga dapat ditentukan dari ketiga gagasan alasan ketidapatuhan suatu negara terhadap suatu rezim internasional yang telah disepakati. Teori ketidapatuhan menjelaskan mengenai terjadinya suatu masalah kepatuhan antara rezim internasional dan perilaku negara (Mitchell R. B., 2001), masalah ketidapatuhan ini dapat terjadi karena tiga alasan yaitu ketidapatuhan karena preferensi, ketidapatuhan karena tidak mampu dan ketidapatuhan karena tidak sengaja (Mitchell R. B., 1996). Analisis terhadap sumber yang menyebabkan ketidapatuhan India terhadap konvensi ILO akan dijelaskan berdasarkan teori *non-compliance* menurut Mitchell sebagai berikut :

4.2.1 **Ketidapatuhan sebagai preferensi (*non-compliance as preference*)**

Secara teoritis, pada aspek *non-compliance as preference*

ketidapatuhan terjadi ketika negara mau menyepakati suatu perjanjian rezim karena mendapat tekanan atau tekanan dari domestik atau memanfaatkan keanggotaan politik saja. Pada beberapa kasus negara dari awal tidak ada maksud untuk mematuhi suatu perjanjian, mereka secara sadar menandatangani perjanjian hanya untuk mengambil keuntungan dan mengumpulkan manfaat politik dari keanggotaan perjanjian tersebut. Aktor negara memilih untuk tidak patuh karena keuntungan dari kepatuhan yang didapat tidak lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan (Mitchell R. B., 1996).

Aspek ketidakpatuhan karena preferensi ini tidak terjadi di India, kenyataan bahwa India mengadopsi konvensi ILO karena pilihan dari India sendiri, bukan berarti India juga memilih untuk tidak patuh terhadap aturan tersebut. Bukti bahwa India memiliki preferensi terhadap ketentuan ILO dapat terlihat dengan adanya Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak (Larangan & Peraturan) tahun 2016 mengenai perubahan larangan lengkap untuk tidak mempekerjakan anak-anak di bawah usia 14 tahun dalam jenis pekerjaan apapun. Perubahan pada UU Pekerja Anak tahun 2016 ternyata membawa UU yang diamandemen menjadi lebih sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No.138, hal inilah yang mendorong pemerintah India untuk meratifikasi konvensi tanpa adanya paksaan atau kepentingan politik yang lain (ILO, 2017). India secara sadar meratifikasi aturan ILO dengan harapan terwujudnya pemberantasan anak di bawah usia minimum. Kenyataannya yang mengakibatkan kegagalan India untuk mematuhi aturan disebabkan karena faktor lain, sehingga ketidakpatuhan India terhadap aturan internasional ILO tidak terjadi karena preferensi atau bukan karena keinginan India untuk memilih tidak patuh. Pemerintah India telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan maupun program tentang pekerja anak sebagai bentuk *awareness* terhadap kasus tersebut. Upaya yang

dilakukan pemerintah India adalah melalui penetapan undang-undang dan peraturan untuk mengatasi pekerja anak (Tabel 4.1), selain itu India juga telah meratifikasi semua konvensi internasional utama mengenai pekerja anak (Tabel 4.2). Bukti bahwa India memiliki preferensi terhadap ketentuan ILO dapat dilihat pada kedua tabel seperti di bawah berikut ini :

Tabel 4. 1 Peraturan Perundang-Undangan India tentang Pekerja Anak

Standar	Memenuhi Standar Internasional	Usia	Perundang-Undangan
Usia Minimum untuk Bekerja	Ya	14	Pasal 3(1) Undang- Undang Amandemen tentang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan & Peraturan)
Usia Minimum untuk Pekerjaan Berbahaya	Ya	18	Bagian 3A UU Pekerja Anak dan Remaja (Larangan & Peraturan)
Identifikasi Pekerjaan atau Aktivitas Berbahaya yang Dilarang untuk Anak-Anak	Ya		Jadwal UU Pekerja Anak & Remaja (Larangan & Peraturan); Kode Keselamatan, Kesehatan, dan Kondisi Kerja
Larangan Kerja Paksa	Ya		Pasal 2(g), 4, dan 16-19 UU Sistem Perburuhan Berikat (Penghapusan); Pasal 367, 368, 370, 371 dan 374 KUHP; Pasal 79 UU Peradilan Anak (Perawatan & Perlindungan Anak)
Usia Wajib Belajar	Ya	14	Bagian 3 UU Hak Anak atas Pendidikan Gratis & Wajib
Pendidikan Umum Gratis	Ya		Bagian 3 UU Hak 41 anak atas Pendidikan Gratis & Wajib

Sumber : *(Bureau of International Labor Affairs, 2022)*

Tabel 4. 2 Ratifikasi India terhadap Konvensi Internasional tentang Pekerja Anak

Konvensi	Ratifikasi
Konvensi ILO No.138, Usia Minimum untuk Bekerja	√
Konvensi ILO No.182, Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	√
KKR PBB (UN CRC)	√
Protokol Opsional KKR PBB (UN CRC) tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak	√

Sumber : *(Bureau of International Labor Affairs, 2022)*

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa India memang sebenarnya memiliki preferensi atau keinginan untuk menghapus pekerja anak di bawah usia 14 tahun, hal ini dibuktikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah India serta konvensi internasional yang sudah diratifikasi mengenai pekerja anak. Pemerintah India juga telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam upaya memberantas pekerja anak, mencakup kebijakan, program-program serta tindakan konkret untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja. Mengurangi pekerja anak memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil :

1. **Penegakan Hukum yang Ketat:**

- **Pengetatan Regulasi** : Menkuatkan dan menegakkan undang-undang yang melarang pekerja anak. Ini termasuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di industri tertentu, seperti garmen, mematuhi standar ketenagakerjaan.
- **Inspeksi Rutin** : Meningkatkan frekuensi dan efektivitas inspeksi oleh petugas ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja anak yang dipekerjakan di tempat kerja (Save The Children, 2015).

2. **Pendidikan:**

- **Akses Pendidikan Gratis dan Wajib** : Memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan dasar yang gratis dan wajib. Program seperti Right to Education Act, 2009 di India bertujuan untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak usia 6-14 tahun (U.S. Department of Labor, 2020).
- **Program Pendidikan dan Kesadaran** : Mengadakan kampanye kesadaran yang menekankan pentingnya pendidikan dan bahaya pekerja anak. Ini dapat dilakukan melalui media, sekolah, dan komunitas lokal.

3. **Peningkatan Ekonomi Keluarga:**

- **Program Pengentasan Kemiskinan** : Mengimplementasikan program-program yang membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin, sehingga mereka tidak perlu mengirim anak-anak mereka bekerja. Contohnya adalah program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi (Save The Children, 2015).
- **Pelatihan Keterampilan untuk Orang Dewasa** : Memberikan pelatihan keterampilan bagi orang dewasa di keluarga yang rentan agar

mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil (Sekhon, 2017).

4. **Kolaborasi dengan Sektor Swasta:**

- **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)** : Mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam inisiatif CSR yang fokus pada penghapusan pekerja anak dan peningkatan kesejahteraan anak-anak.
- **Supply Chain Monitoring** : Memastikan bahwa seluruh rantai pasokan bebas dari pekerja anak melalui audit independen dan transparansi dalam proses produksi (FEMNET, 2019).

5. **Rehabilitasi dan Dukungan:**

- **Program Rehabilitasi** : Menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi untuk anak-anak yang telah diselamatkan dari pekerjaan. Ini termasuk layanan psikososial, pelatihan keterampilan, dan akses ke pendidikan (Save The Children, 2015)
- **Pusat Dukungan Anak** : Mendirikan pusat-pusat dukungan bagi anak-anak yang rentan dan memberikan layanan dukungan komprehensif.

6. **Kesadaran dan Partisipasi Komunitas:**

- **Kampanye Kesadaran Masyarakat** : Meningkatkan kesadaran di kalangan komunitas tentang hak-hak anak dan bahaya pekerja anak melalui kampanye lokal.
- **Partisipasi Komunitas** : Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan pekerja anak, termasuk melibatkan pemimpin komunitas dan kelompok keagamaan dalam advokasi hak-hak anak.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk secara signifikan mengurangi jumlah pekerja anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Maka dapat dikatakan bahwa aspek ketidakpatuhan sebagai preferensi ini tidak terjadi di India, hal ini terbukti dari segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk mengatasi permasalahan pekerja anak yang tidak sesuai dengan ketentuan ILO.

4.2.2 Ketidakpatuhan karena ketidakmampuan (*non-compliance due to incapacity*)

Secara teoritis pada aspek *non-compliance due to incapacity* ini, ketidakpatuhan disebutkan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakmampuan finansial, administratif atau teknologi, serta keengganan masyarakat untuk mematuhi. Ketidakpatuhan karena alasan ini lebih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, salah satunya adalah seperti yang terjadi di India. Kurangnya kapasitas administratif suatu negara dapat mengakibatkan ketidakmampuan negara tersebut untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Nilai-nilai lokal yang berlaku di suatu negara juga menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional, karena terkadang aturan tersebut dianggap bertentangan dengan kearifan lokal setempat. Konteks budaya, sosial dan sejarah juga dapat membuat kepatuhan negara menjadi lebih sulit diperoleh, gaya kebijakan di pemerintahan pun dapat menghalangi penerapan instrumen kebijakan yang akan memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan tertentu dengan sumber daya yang tersedia di negara tersebut (Mitchell R. B., 2007).

Aspek *non-compliance due to incapacity* adalah aspek yang terjadi di India, pada kasus ini aspek ketidakmampuan memberikan kontribusi negatif dan menjadikan India secara signifikan sulit untuk mematuhi ketentuan ILO.

India gagal untuk mematuhi rezim akibat adanya ketidakmampuan sumber daya keuangan yang terjadi di masyarakat, selain itu adanya aspek ketidakmampuan dari sisi pemerintah dalam menjalankan efektivitas kebijakan yang dibuat. Secara harfiah India belum mampu untuk menghapus pekerja anak di bawah usia minimum seperti apa yang ditetapkan dalam konvensi ILO, melihat tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat India memang sangat tinggi. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan adanya aspek ketidakmampuan (*incapacity*) di India :

1. Finansial (*financial*)

Pemerintah India telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah pekerja anak, termasuk memberikan bantuan finansial kepada industri garmen. Kementerian tekstil pemerintah India telah memberikan dukungan subsidi kepada industri garmen termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta unit manufaktur tekstil kecil di seluruh negeri termasuk Maharashtra melalui skema seperti Skema Dana Peningkatan Teknologi yang Diubah atau *Amended Technology Upgradation Fund Scheme* (ATUFS) dan PowerTex India. Berdasarkan ATUFS, Kementerian telah memberikan Subsidi Investasi Modal atau *Capital Investment Subsidy* (CIS) untuk peningkatan teknologi sebesar 15% untuk sektor garmen dan teknis tekstil dengan batas maksimal Rs. 30 crores atau sekitar Rp. 300.000.000,00. CIS telah diberikan sebesar 10% untuk segmen tenun, pemrosesan, rami, sutra dan tenun tangan dengan batas maksimal Rs. 20 crores atau sekitar Rp. 200.000.000,00. Subsidi ini telah diberikan kepada entitas individu, untuk pelaksanaan selama periode Januari 2016 hingga Maret 2022 (Ministry of Textiles, 2022).

Berdasarkan Skema PowerTex India bantuan telah diberikan untuk peningkatan *In situ scheme*, *Yarn Bank scheme*, dan *Work Shed Project* atau proyek gudang kerja untuk memperkuat sektor alat tenun listrik yang

terdesentralisasi selama April 2017 hingga Maret 2021. Total bantuan sebesar Rs. 314,80 crores berdasarkan ATUFS dan Rs. 40,51 crores berdasarkan PowerTex India telah diberikan kepada unit tekstil di Maharashtra selama periode di atas. Adapun dukungan yang diberikan pada industri garmen di Maharashtra dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Bantuan Dana ATUFS dan PowerTex India untuk Industri Garmen di Maharashtra

No. Pokok	Nama Skema	Jumlah Unit/Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan (dalam Rs. crore)
1.	Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS)	785	314,80
2.	PowerTex India	In situ scheme – 3,351	30,71
		Work Shed Projects – 18	7,01
		Yarnk Bank Projects – 11	2,80

Sumber : (*Minister of State for Textile, Smt. Darshana Jardosh, 2022*)

2. **Administratif (*administrative*)**

Perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan, promosi ekspor dan regulasi industri garmen di India dikelola di bawah Kementerian Tekstil, Pemerintah India. Namun ada beberapa masalah administratif yang dihadapi oleh industri-industri garmen di India (Warade, 2019) seperti :

- Kekurangan pasokan bahan baku, hal ini dikarenakan masalah polusi sehingga beberapa unit Tiongkok dan Eropa telah ditutup yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku dasar dan

banyak faktor lain seperti cuaca yang mempengaruhi pasokan bahan baku.

- Meningkatnya biaya bahan baku, disebabkan karena kondisi pasar yang tidak diprediksi, karena cuaca yang tidak menentu, serta perubahan kebijakan menyebabkan kenaikan bahan baku.
- Masalah lingkungan, kepatuhan lingkungan seringkali menjadi sorotan utama bagi para importir tekstil dan garmen.
- Kendala infrastruktur, Infrastruktur India yang buruk dan tidak memadai sehingga terus tertinggal dari banyak negara lainnya.
- Dampak *Goods and Services Tax* (GST) atau Pajak Barang dan Jasa, DST adalah bentuk penerus PPN yang digunakan India atas penyediaan barang dan jasa, ini merupakan pajak komprehensif dan multi-tahap. Meskipun bersifat multi-tahap GST dikenakan pada setiap langkah dalam proses produksi, GST dimaksudkan untuk menggantikan pajak tidak langsung dengan pajak gabungan dan diharapkan dapat membentuk kembali perekonomian negara yang bernilai \$3,5 triliun, namun penerapannya mendapat kritik karena berdampak pada hal lainnya.
- Kekurangan tenaga kerja karena pengembalian massal, hal ini dikarenakan adanya Pandemi COVID19 sehingga banyak tenaga kerja yang diberhentikan karena krisis ekonomi maka banyak industri garmen yang mengambil jalan tengah dengan mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun agar diupah rendah.
- Penurunan ekspor pakaian, karena kurangnya tenaga kerja dan ada kendala dalam infrastruktur yang tidak memadai mengakibatkan penurunan ekspor pakaian dari India, yang mana

pada tahun 2020 industri pakaian jadi India yang diperkirakan mencapai USD 74 miliar kini diperkirakan turun hampir 10-15%.

Dari beberapa masalah administratif yang dialami oleh industri garmen, maka perlu adanya langkah perbaikan dan dukungan dari pemerintah pusat serta negara bagian untuk meningkatkan industri garmen di India agar memungkinkan bersaing di level tertinggi. Pemerintah negara bagian harus memberikan semua persetujuan yang berlaku demi kemajuan industri garmen, termasuk penyediaan pabrik pengolahan limbah umum untuk peningkatan skala bisnis yang cepat (Warade, 2019). Pemerintah India juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan bantuan administratif kepada industri garmen dalam rangka mengurangi pekerja anak di bawah usia 14 tahun, namun sama halnya dengan bantuan finansial dalam perihal administrasi meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya namun kenyataannya masih ada tantangan dan tidak dapat berhasil untuk dilakukan sepenuhnya. Berikut adalah beberapa langkah utama yang telah diambil oleh pemerintah India :

1. Penegakan Hukum yang Ditingkatkan

- **Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016**
: Pada tahun 2016 Undang-Undang Pekerja Anak (Larangan & Peraturan) ini dilakukan Amandemen dengan melarang sepenuhnya pekerja anak di bawah usia 14 tahun di semua sektor, termasuk pada industri garmen. Selain itu, anak-anak berusia 14-18 tahun dilarang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. Nyatanya meski telah dibuat UU mengenai larangan mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun tidak membuat para pelaku takut maka dengan dibuatnya UU saja tidak cukup.
- **Inspeksi Rutin dan Denda** : Pemerintah telah meningkatkan inspeksi

di pabrik-pabrik garmen dan menetapkan denda yang lebih tinggi bagi pelanggaran hukum pekerja anak. Petugas ketenagakerjaan di berbagai negara bagian melakukan inspeksi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang (Sekhon, 2017). Efektivitasnya sering kali terbatas oleh kurangnya sumber daya serta kapasitas penegakan hukum di tingkat lokal, masih banyak pabrik garmen yang dapat menghindari deteksi karena ada beberapa pabrik yang operasinya tersembunyi dan tersebar dalam unit-unit kecil yang sulit diakses oleh petugas inspeksi (U.S. Department of Labor, 2020). Banyaknya kasus korupsi di tingkat lokal dan keterbatasan administratif juga menghambat efektivitas penegakan hukum, dalam beberapa kasus pelanggar mampu menyuap petugas inspeksi atau menggunakan koneksi politik untuk menghindari sanksi (Sekhon, 2017).

2. Program Rehabilitasi dan Pendidikan

- ***National Child Labour Project (NCLP)*** : Program ini bertujuan untuk menyelamatkan, merehabilitasi, dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang bekerja. NCLP mendirikan pusat-pusat khusus di berbagai daerah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada anak-anak yang diselamatkan dari pekerjaan. Namun keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sering kali menghambat efektivitas program. Pusat NCLP kadang-kadang kekurangan fasilitas dan staf yang memadai untuk menangani jumlah anak yang diselamatkan. Implementasi program NCLP juga tidak merata di seluruh India, dengan beberapa daerah lebih berhasil daripada yang lain. Hal ini dikarenakan kurangnya sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat membuat sulit untuk mengukur secara akurat dampak jangka panjang dari program tersebut. Sehingga, banyak anak yang mungkin kembali bekerja setelah rehabilitasi awal karena tekanan

ekonomi yang terus berlanjut pada keluarga mereka (U.S Department of Labour, 2021).

- ***Right to Education Act, 2009*** : Menjamin pendidikan dasar gratis dan wajib bagi semua anak usia 6-14 tahun. Ini bertujuan untuk mengurangi jumlah anak yang bekerja dengan memastikan mereka berada di sekolah (Sekhon, 2017). Meskipun telah diberlakukannya pendidikan gratis dan wajib dari pemerintah India ternyata kebijakan tersebut masih belum dapat menghilangkan jumlah anak yang putus sekolah. Hal ini terbukti pada data anak-anak putus sekolah dasar antara tahun 2020- 2021 & 2021-2022 di India yaitu sebanyak 4.700.997 atau sekitar 4,7 juta siswa, dengan total siswa yang putus sekolah di kelas dasar sekitar 2.450.633 (2,4 juta) dan sebanyak 2.250.364 siswa (2,2 juta) yang putus di kelas atas sekolah dasar (Mehta, 2023). Jumlah anak yang putus sekolah di kelas dasar antara tahun 2020-2021 dan 2021-2022 per negara bagian di India, tidak ditemukan adanya anak yang putus sekolah di Chandigarh, Delhi, Goa, Kerala, Tamil Nadu serta Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Diu (Mehta, 2023). Meskipun negara-negara bagian ini tidak mempunyai angka putus sekolah, namun angka retensi tidak berarti bahwa semua orang yang masuk ke dalam sistem lima tahun yang lalu dapat dipertahankan.

3. **Program Pelatihan dan Pemberdayaan**

- ***Skill India Initiative*** : Inisiatif seperti skema Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pekerja anak dengan menyediakan pelatihan keterampilan kepada anak-anak dan remaja. Program ini menyediakan pelatihan keterampilan bagi remaja untuk meningkatkan peluang kerja yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan anak.

Ini termasuk pelatihan dalam industri garmen, yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan mengurangi kebutuhan akan pekerja anak (U.S. Department of Labor, 2020). Adapun infrastruktur pelatihan yang kurang memadai di beberapa daerah dan tantangan logistik dalam menjangkau populasi terpencil juga menghambat pelaksanaan program yang efektif. Ini mencakup masalah transportasi, akses ke teknologi, dan sumber daya pelatihan (Bhardwaj, 2023). Keterbatasan pendanaan dan sumber daya dapat menghambat skalabilitas dan keberlanjutan program. Ada kebutuhan untuk alokasi anggaran yang lebih besar dan manajemen sumber daya yang lebih efektif untuk memastikan keberhasilan jangka panjang (Drishti Ias, 2023).

- ***Integrated Child Protection Scheme (ICPS) atau Skema Perlindungan Anak Terpadu*** : Program ini merupakan sebuah bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah India berupa kontribusi yang signifikan untuk menciptakan sistem yang bertujuan melindungi anak secara efisien dan efektif, juga berfokus pada rehabilitasi anak-anak yang bekerja dengan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anak-anak dalam situasi sulit, serta pengurangan kerentanan terhadap situasi dan tindakan yang mengarah pada pelecehan, pengabaian, eksploitasi, penelantaran, dan pemisahan anak-anak dari keluarga mereka (U.S. Department of Labor, 2020). Bentuk bantuan finansial dari pemerintah Pusat di bawah ICPS akan disalurkan ke Pemerintah Negara Bagian, Pemerintah Pusat akan menyediakan presentase yang telah ditentukan sebelumnya dari biaya yang dianggarkan lalu Negara Bagian pada gilirannya akan menyediakan hibah bantuan kepada organisasi sukarela di bawah berbagai komponen ICPS (CENTRAL ADOPTION RESOURCE

AGENCY GOV). Berdasarkan pada skema ICPS ini, layanan gratis berupa makanan, pakaian, perlengkapan tidur, medis dan pendidikan, dll diberikan kepada anak-anak sesuai standar minimum dalam hal Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) Tahun 2015 dan Peraturan Model Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) Tahun 2016. Layanan pengasuhan dan layanan pasca perawatan merupakan komponen penting dari skema ini, serta menyediakan rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak tersebut ke dalam masyarakat melalui peningkatan keterampilan, adopsi, dll (Pradesh, 2024). Namun, meskipun telah dilakukannya upaya ini, implementasi dan efektivitasnya sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan pengawasan yang memadai.

4. **Kampanye Kesadaran**

- **Awareness Campaigns** : Pemerintah telah meluncurkan berbagai kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat tentang bahaya pekerja anak dan pentingnya pendidikan. Kampanye ini dilakukan melalui media massa, sekolah dan komunitas lokal. Kesadaran tentang program ini masih rendah di beberapa daerah pedesaan, yang membatasi partisipasi. Banyak pemuda di daerah terpencil belum mengetahui manfaat dan peluang yang ditawarkan (Drishti Ias, 2023).

5. **Kerjasama dengan Lembaga Internasional dan LSM**

- **Kolaborasi dengan ILO** : Pemerintah India bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) dalam berbagai program untuk memerangi pekerja anak. Ini termasuk pelatihan untuk petugas penegak hukum dan kampanye kesadaran publik (U.S. Department of Labor, 2020). Meskipun telah bekerjasama dengan ILO tidak menjamin untuk dapat menghilangkan pekerja anak, bahkan India sendiri tidak mematuhi Konvensi ILO No.138 yang telah diratifikasi.

- **Kemitraan dengan LSM :** Banyak LSM di India yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi pekerja anak. Mereka juga membantu dalam mengimplementasikan program-program pemerintah dan memastikan kepatuhan di tingkat lokal (Sekhon, 2017). Namun, untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan dalam hal sumber daya, pengawasan, dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LSM. Tantangan ekonomi dan sosial yang mendalam juga perlu ditangani secara komprehensif untuk memastikan bahwa anak-anak yang diselamatkan dari pekerjaan tidak kembali ke kondisi kerja yang sama.

Industri garmen di India telah mendapatkan tempat khusus dalam perekonomian negara karena prospek masa depannya yang kuat, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah agar tidak ada lagi industri garmen yang menyalahgunakan aturan dengan mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun hanya untuk mengejar target produksi. Apabila masalah-masalah yang ada pada industri garmen ini teratasi maka angka ekspor yang kuat dapat dilihat di masa yang akan datang.

3. **Teknologi (*technology*)**

Cara untuk membuat industri garmen kompetitif di pasar global, maka pemerintah India perlu fokus pada peningkatan teknologi dan memperluas kapasitas penenunan untuk dapat meningkatkan skala operasi (Warade, 2019). Pemerintah India telah secara aktif mendukung industri garmen melalui berbagai inisiatif yang ditujukan untuk modernisasi dan kemajuan teknologi. Inisiatif ini meliputi Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks, yang bertujuan untuk menciptakan infrastruktur kelas dunia bagi industri garmen dan skema Production Linked Incentive (PLI), yang dirancang untuk mempromosikan produksi pakaian dari serat

buatan (MMF) kain MMF dan tekstil teknis (The India Textile Journal (ITJ), 2024). Selain itu, pemerintah telah menerapkan Amended Technology Upgradation Fund Scheme (A-TUFS) untuk memfasilitasi adopsi teknologi terbaru di sektor garmen. Skema ini, bersama dengan skema lainnya seperti Scheme for Integrated Textile Parks (SITP) dan skema SAMARTH untuk pengembangan kapasitas, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri tekstil India dalam skala global (Gartex Texprocess India, 2024).

Upaya-upaya ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi pekerja anak dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan industri pada tenaga kerja manual. Fokus pemerintah pada peningkatan infrastruktur teknologi di sektor garmen diharapkan dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih baik dan mengurangi insentif ekonomi untuk mempekerjakan pekerja anak. Bantuan teknologi yang diberikan oleh pemerintah India kepada industri garmen, meskipun bermanfaat dalam beberapa hal, telah memberikan hasil yang beragam dalam mengurangi pekerja anak secara langsung. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai dampak kemajuan teknologi dalam mengurangi pekerja anak:

1. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

Pengenalan mesin canggih dan otomatisasi dalam industri garmen telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang berpotensi mengurangi permintaan tenaga kerja manual, termasuk pekerja anak. Program-program seperti Skema Dana Peningkatan Teknologi yang Diubah (A-TUFS) dan skema Insentif Terkait Produksi (PLI) bertujuan untuk memodernisasi sektor tekstil dan membuatnya kurang bergantung pada proses padat karya (Shah, 2022).

2. Kondisi Kerja yang Lebih Baik

Teknologi yang lebih baik sering kali menghasilkan kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi bagi pekerja dewasa, yang dapat mengurangi tekanan ekonomi pada keluarga untuk mengirim anak-anak mereka bekerja. Teknologi yang lebih baik dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan bergaji lebih baik, sehingga mencegah pekerja anak (Gartex Texprocess India, 2024).

Namun dengan adanya dampak kemajuan teknologi dalam industri garmen India, tidak menutup kemungkinan bahwa tantangan tetap terjadi dan membuka peluang bagi para pekerja anak di bawah usia 14 tahun, adapun tantangan yang dialami dalam hal bantuan teknologi pada industri garmen adalah sebagai berikut :

1. Jangkauan Tidak Lengkap

Meskipun ada kemajuan teknologi ini, jangkauan dan penerapan teknologi ini tidak seragam di seluruh industri. Banyak perusahaan kecil dan menengah (UKM) masih mengandalkan metode tradisional yang padat karya karena tingginya biaya peningkatan ke mesin canggih (Shah, 2022).

2. Faktor Ekonomi

Penggerak utama pekerja anak, seperti kemiskinan dan kurangnya akses ke pendidikan, tidak sepenuhnya diatasi dengan peningkatan teknologi saja. Meskipun teknologi dapat meningkatkan produktivitas, teknologi tidak secara langsung meringankan kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan keluarga bergantung pada pekerja anak (Gartex Texprocess India, 2024).

Meskipun kemajuan teknologi dalam industri garmen yang didukung oleh inisiatif pemerintah telah berkontribusi pada produktivitas dan kondisi kerja yang lebih baik, namun hal tersebut belum sepenuhnya menghilangkan masalah pekerja anak. Keberhasilan inisiatif ini dalam mengurangi pekerja anak bergantung pada reformasi sosial ekonomi yang lebih luas, penegakan hukum ketenagakerjaan yang lebih baik dan upaya berkelanjutan untuk

memberikan pendidikan dan dukungan ekonomi kepada keluarga yang rentan. Pendekatan multifaset ini penting untuk mencapai pengurangan signifikan dalam pekerja anak di industri garmen.



4.2.3 Ketidakpatuhan karena ketidaksengajaan (*non-compliance due to inadvertence*)

Aspek ketidaksengajaan ini terjadi ketika negara atau aktor telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan. Suatu negara sudah berinisiatif mengambil tindakan untuk mencapai kepatuhan, namun gagal memenuhi standar perjanjian karena suatu faktor dalam ketidaksengajaan. Ketidakpatuhan karena ketidaksengajaan disebabkan oleh kesalahan negara itu sendiri yang lengah dalam penerapan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Negara dapat mengambil tindakan dengan niat yang tulus untuk mencapai kepatuhan, namun tetap gagal memenuhi standar perjanjian karena masalah ini tidak terbatas hanya pada ketidakpastian yang melekat pada negara berkembang tetapi juga dapat memungkinkan terjadi pada negara maju. Kepatuhan tidak berhasil dilakukan ketika negara mengalami kelengahan dalam upaya mengubah perilaku warga dan secara tidak sengaja mereka akan gagal untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kasus ketidakpatuhan yang terjadi di India dapat dikatakan terjadi karena adanya ketidaksengajaan ini, India lengah dalam penerapan ketentuan internasional yang sudah diratifikasi yaitu pada Konvensi ILO No.138.

Kelengahan pemerintah dalam menjalankan efektivitas kebijakan juga menjadi penyebab yang mempengaruhi ketidakpatuhan India terhadap ketentuan ILO. Kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional dapat dilihat dari keefektifan aturan pemerintah lokal yang telah dibuat. Mitchell mengklasifikasi kepatuhan negara terhadap aturan yang disepakati menjadi dua bagian dan mengaitkan dengan keefektifannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 4 High-Low Compliance and Effectiveness

	<i>High Effectiveness</i>	<i>Low Effectiveness</i>
High Compliance	Terdapat aturan yang efektif dan dipatuhi oleh banyak pihak. Tujuan dapat tercapai dengan baik karena tingginya kepatuhan terhadap suatu aturan dengan hasil yang efektif (<i>Treaty-Induced Compliance</i>).	Tingkat kepatuhan suatu negara tinggi, namun keefektifan suatu regulasi atau aturan masih kurang (<i>Coincidental Compliance</i>).
Low Compliance	Keadaan suatu negara yang kurang patuh terhadap aturan, namun dapat mencapai tujuan dengan tingkat efektivitas yang tinggi (<i>Good Faith Non-Compliance</i>).	Keadaan suatu negara yang kurang patuh terhadap aturan yang telah disepakati dan kurang efektif untuk dijalankan (<i>Intentional Non-Compliance</i>).

Sumber : (Mitchell R. B., 2007)

Apabila dilihat dari tabel tinggi rendahnya tingkat kepatuhan dan keefektifan suatu aturan yang dikemukakan oleh Mitchell, maka India pada kasus ini masuk pada kategori *intentional non-compliance*. Suatu negara yang kurang patuh terhadap aturan yang telah disepakati dan kurang efektif untuk dijalankan, sama halnya dengan India yang tidak patuh terhadap Konvensi ILO No.138 yang telah disepakati namun tidak efektif untuk dijalankan. Dengan telah dibuatnya kebijakan untuk mengurangi pekerja anak namun tidak dapat berjalan dengan efektif, maka dapat dikatakan bahwa adanya kelengahan dari pemerintah India sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Kegagalan India tidak dapat dikatakan bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada pemerintah India, melainkan perlu juga adanya kerjasama dan kesadaran dari masyarakat India itu sendiri. Kebijakan yang dilakukan pemerintah India untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak seperti dengan dibuatnya juga kurang efektif sehingga hal tersebut dapat dikatakan menjadi alasan kendala India

dalam upaya untuk mematuhi penghapusan pekerja anak di bawah usia minimum belum berhasil.

Pemerintah India telah menetapkan kebijakan terkait pekerja anak, namun terdapat kesenjangan kebijakan yang menghambat upaya untuk mengatasi pekerja anak, termasuk kurangnya tindakan di beberapa negara bagian India untuk membuat rencana aksi menghapus pekerja anak (U.S Department of Labour, 2021). Adanya kesenjangan kebijakan dan kurangnya tindakan perwujudan penghapusan pekerja anak di seluruh wilayah di India menyebabkan kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif sehingga mengakibatkan pemerintah tidak patuh terhadap ketentuan ILO yang telah disepakati. Beberapa Kebijakan Nasional India adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Kebijakan Utama Pemerintah India Terkait Pekerja Anak

Kebijakan	Deskripsi & Aktivitas	Efektifitas
Kebijakan Nasional tentang Pekerja Anak	Bertujuan untuk mengatasi pekerja anak dan mencakup kegiatan khusus untuk penyediaan bantuan kepada anak-anak.	Kurang Efektif
Rencana Aksi Nasional untuk Anak	Mengidentifikasi tindakan prioritas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Kebijakan Nasional untuk Anak, termasuk kelas sesuai usia untuk anak-anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan perdagangan anak.	Kurang Efektif
Rencana Aksi Negara mengenai Pekerja Anak	Hanya ada 11 dari 28 negara bagian dan wilayah persatuan: Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Meghalaya, Odisha, Punjab, Tamil Nadu dan Uttar Pradesh.	Kurang Efektif

Sumber : (U.S Department of Labour, 2021)

Pada tahun 2022 pemerintah India mendanai dan berpartisipasi dalam program-program untuk menghapuskan pekerja anak (Tabel 4.6). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam program-program sosial ini, termasuk pengecualian terhadap rumah penampungan yang dikelola pemerintah, didanai pemerintah, dan dikelola swasta yang memberikan bantuan kepada korban bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (U.S. Department of Labor, 2020). Aktivitas dan deskripsi program bantuan finansial dari pemerintah serta perkembangan program-program tersebut dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 6 Program Sosial Utama untuk Menangani Pekerja Anak

Program	Deskripsi & Aktivitas
<p>Skema Proyek Pekerja Anak Nasional atau <i>National Child Labor Project (NCLP) Scheme</i></p>	<p>Program MOLE yang beroperasi di tingkat distrik untuk mengidentifikasi anak-anak yang bekerja, mengeluarkan mereka dari pekerjaan berbahaya, dan memberi mereka pendidikan dan pelatihan kejuruan (Srivastava, 2019). Terdiri dari sekitar 3.000 NCLP <i>Special Training Centers</i> (STC) atau Pusat Pelatihan Khusus dengan sekitar 120.000 anak yang menerima dukungan seperti tunjangan, makanan, dan pemeriksaan kesehatan (Ministry of Labour and Employment, 2018). Dari April 2021 hingga Maret 2022, selama pandemi, program NCLP mengeluarkan 13.271 anak dari pekerja anak dan memberikan layanan kepada para korban, penurunan dari 58.289 pembebasan dari periode pelaporan sebelumnya (U.S. Embassy, 2023). Penurunan ini disebabkan oleh</p>

	<p>penggabungan skema tersebut dengan Samagra Shiksha Abhiyan (SSA atau Kampanye Pendidikan Komprehensif) milik Departemen Pendidikan menjelang akhir tahun 2022 (U.S. Embassy, 2023). Pada bulan Maret 2022, pemerintah menghentikan STC dan mendorong negara bagian untuk mengirim mantan korban pekerja anak ke sekolah-sekolah setempat. Namun dilansir dari para pengamat mencatat bahwa sejak penutupan STC, banyak anak telah kembali memasuki pasar tenaga kerja karena sekolah-sekolah setempat tidak dapat menampung semua anak yang dibebaskan dan tidak menyediakan layanan perawatan setelahnya yang dibutuhkan oleh pekerja anak (Selvam, 2022) (Palanivel, 2022).</p>
<p>Skema Sektor Pusat untuk Rehabilitasi Pekerja Terikat atau <i>Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Laborers Scheme</i></p>	<p>Program MOLE yang menyediakan bantuan keuangan dan layanan perlindungan sosial bagi pekerja terikat yang dibebaskan (Ministry of Labour and Employment, 2018). Mendukung pendanaan survei di tingkat distrik tentang prevalensi pekerja terikat (Ministry of Labour and Employment, 2019). Pada tahun 2022, pemerintah meningkatkan kompensasi bagi korban pekerja terikat dari USD \$125 menjadi \$375 (Government of India, 2022). Akan tetapi, penelitian tidak dapat memastikan apakah program ini telah memberikan layanan secara efektif kepada mantan pekerja terikat. Laporan media terkini menunjukkan bahwa hingga April 2022, beberapa pekerja terikat yang dibebaskan belum menerima kompensasi (Express News Service, 2022).</p>

<p>Aktivitas Anti-Perdagangan Manusia atau <i>Anti-Human Trafficking Activities</i></p>	<p>Aktivitas anti-perdagangan manusia yang dioperasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan LSM dan pemerintah negara bagian (Ministry of Women and Child Development, 2018). Mendukung proyek untuk membantu reintegrasi, menyediakan layanan, dan memulangkan korban perdagangan manusia, termasuk anak-anak, melalui proyek Ujjwala dan Swadhar Greh (Ministry of Women and Child Development, 2018). Pada tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggabungkan skema Ujjwala dan Swadhar Greh dalam skema Shakti Sadan, yang merupakan proyek bantuan dan layanan terpadu. Rumah-rumah ini menyediakan tempat berteduh, makanan, sandang, dan kesehatan primer (U.S. Department of State official (USDOL), 2023). Pengamat telah melaporkan bahwa tempat penampungan perdagangan manusia yang didukung pemerintah belum menerima pendanaan yang memadai dan banyak yang beroperasi dengan defisit (Department of Labor, 2022). Akibat kondisi yang tidak aman ditambah dengan dugaan penganiayaan oleh pengasuh, pihak berwenang melaporkan banyak kejadian pada tahun 2022 di mana anak-anak melarikan diri (U.S. Department of State, 2022).</p>
--	---

Sumber : (U.S Department of Labour, 2021)

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dipahami bahwa pemerintah India telah melakukan upaya dan kebijakannya yang bertujuan untuk mengatasi

permasalahan pekerja anak di bawah usia minimum, namun meskipun hal ini telah dilakukan kenyataannya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah India telah mengupayakan segala upaya untuk mengatasi isu ini namun pada akhirnya program tersebut tidak dapat untuk menghentikan pekerja anak illegal sepenuhnya karena kelalaian dari pemerintah itu sendiri dengan masih kurangnya sumber daya serta pengawasan yang memadai membuktikan bahwa kebijakan serta program tidak dikerahkan secara maksimal sehingga semua berjalan dengan tidak efektif.



BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa isu pekerja anak di bawah usia 14 tahun dalam industri garmen di India ini merupakan permasalahan yang sulit untuk dihilangkan yang disebabkan oleh beberapa tantangan multifaset. Kondisi pekerja anak di sektor garmen India sangat memprihatinkan, namun keberadaannya sulit untuk diprediksi karena kasus pekerja anak ini bersifat tersembunyi dan informal serta tersebar dalam unit-unit kecil yang sulit diakses. Penetapan usia minimum untuk bekerja telah diatur oleh standar ILO, namun meskipun pemerintah India telah meratifikasi ketentuan ini dan mengadopsi kebijakan untuk memerangi pekerja anak, upaya ini masih terbatas dan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada secara menyeluruh. Pelanggaran serius mengenai pekerja anak di bawah usia minimum kerja masih terjadi di sektor industri garmen India. Faktor penyebab ketidakpatuhan India terhadap ketentuan ILO ini dapat dianalisis melalui teori *non-compliance* oleh Ronald B. Mitchell.

Penyebab ketidakberhasilan pemerintah India untuk mematuhi ketentuan ILO ditinjau dan dikaitkan berdasarkan ketiga aspek yang ada pada teori *non-compliance* untuk menentukan pada aspek apa yang menjadikan India tidak patuh terhadap ketentuan ILO, ketiga aspek yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan suatu negara yaitu; *non-compliance preference*, *non-compliance due to incapacity*, *non-compliance due to inadvertence*. Pada kategori preferensi adanya praktik dimana India memang berminat untuk mewujudkan apa yang ada dalam ketentuan ILO mengenai penghapusan pekerja anak di bawah usia minimum. Bukti dari adanya Undang-Undang Amandemen Pekerja Anak (Larangan & Peraturan) 2016, membuat Peraturan Perundang-Undangan lain tentang pekerja anak, serta meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait pekerja anak selain Konvensi ILO No.138 dan beberapa langkah konkret lainnya, hal ini terbukti dari segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk mengatasi permasalahan pekerja anak yang tidak sesuai dengan ketentuan ILO.

Dapat ditemukan bahwa terdapat beberapa usaha pemerintah India yang menunjukkan keinginan untuk mewujudkan apa yang ada dalam ketentuan ILO mengenai penghapusan pekerja anak di bawah usia minimum. Hal ini dibuktikan dalam bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Tekstil berupa dukungan finansial dan teknologi untuk beberapa industri garmen, yang mana hal ini masuk pada kategori ketidakmampuan ada tiga hal yang dapat menyebabkan gagalnya kepatuhan karena tidak mampu yakni dapat disebabkan karena ketidakmampuan finansial, administratif atau teknologi. Namun yang terjadi di India ini, pemerintah telah mengusahakan bantuan dalam ketiga hal tersebut meskipun tantangan masih tetap ada namun pemerintah telah mengusahakan upaya untuk meminimalisir terjadinya pekerja anak pada industri garmen. Sehingga meskipun pekerja anak di bawah usia minimum pada industri garmen ini tidak dapat hilang sepenuhnya, maka ketidakpatuhan India bukan disebabkan karena adanya ketidakmampuan.

Lalu dilihat dari faktor ketidaksengajaan (*inadvertence*) yang terjadi ketika negara telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan karena adanya ketidaksengajaan atau kelalaian. Pada kasus ini dapat dikatakan bahwa India gagal dalam penerapan ketentuan internasional yang sudah diratifikasi, yakni untuk mencapai tujuan tidak ada lagi pekerja anak di bawah usia minimum. Pemerintah India telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan maupun program tentang pekerja anak sebagai bentuk *awareness* terhadap kasus tersebut, namun kebijakan dan program yang dilakukan untuk penghapusan pekerja anak tidak berjalan dengan baik. Pemerintah India telah mengupayakan segala upaya untuk mengatasi isu ini namun pada akhirnya program tersebut tidak dapat untuk menghentikan pekerja anak illegal sepenuhnya karena kelalaian dari pemerintah itu sendiri dengan masih kurangnya sumber daya serta pengawasan yang memadai membuktikan bahwa kebijakan serta program tidak dikerahkan secara maksimal sehingga semua berjalan dengan tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- (2018, November 27). Retrieved January 21, 2023, from Kumparan STYLE:
<https://kumparan.com/kumparanstyle/isu-pekerja-anak-di-industri-fashion-dunia-1543304102524262547/full>
- Alfarisi, H. (2021). Analisis Kerjasama Pemerintahan Regional DIY dan Kyoto: Sekarang dan Masa Mendatang. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Ilmu Sosial (Publicio)*, Vol. 3, No. 1, 21.
- Andonova, L. B. (2019). *Governance Entrepreneurs: International Organizations and the Rise of Global Public-Private Partnerships*. Geneva: Graduate Institute for International and Development Studies.
- Annan, K. (2000). *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia*. Ulaanbaatar: United Nation Organization.
- Archer, C. (1992). *International Organizations* second edition. London: Routledge.
- Archer, C. (2015). *International Organizations (Fourth Edition)*. New York: Routledge.
- Beisheim, M., Liese, A., Janetschek, H., & Sarre, J. (2014). Transnational Partnerships: Conditions for Successful Service Provision in Areas of Limited Statehood. *International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 1.
- Bell, S., & Hindmoor, A. (2009). A State-Centric Relational Approach. In S. Bell, & A. Hindmoor, *Rethinking Governance: The Centrality of The State in Modern Society* (p. 1). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bhalla, S. S., Bhasin, K., & Virmani, A. (2022, April 14). *Raising the standard: Time for a higher poverty line in India*. Retrieved October 10, 2023, from Brookings: <https://www.brookings.edu/articles/raising-the-standard-time-for-a-higher-poverty-line-in-india/>
- Bhardwaj, N. (2023, August 03). *India Skill Report 2023: Findings on Talent Availability and Employability in Emerging Technologies*. Retrieved July 29, 2024, from India Briefing: <https://www.india-briefing.com/news/india-skill-report-2023-findings-on-talent-availability-and-employability-in-emerging-technologies-29148.html/>
- Burchill, S. (2001). Liberalism. In S. Burchill, R. Devetak, A. Linklater, M. Pterson, C. Reus-Smit, & J. True, *Theories of International Relation (Second Edition)* (p. 29). New York: Palgrave .

- Bureau of International Labor Affairs. (2022). *List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor*. Retrieved September 03, 2023, from U.S. Department of Labor: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-print#collapseExample>
- Bureau of International Labor Affairs. (2022, September 28). *U.S. Department of Labor*. Retrieved September 03, 2023, from List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-print#collapseExample>
- Butler, E. (2015). *Classical Liberalism - A Primer*. London: Institute of Economic Affairs.
- Cameron, J., Werksman, J., & Roderick, P. (1996). *Improving Compliance with International Environmental Law*. New York: Earthscan .
- Census India. (2011). *Economic Tables* . India: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India Ministry of Home Affairs, Government of India.
- CENTRAL ADOPTION RESOURCE AGENCY GOV. (n.d.). *REVISED THE INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME (ICPS)*. India: Ministry of Women & Child Development.
- Chaudhri, D. P. (1997b). Female child labour and gender bias in school education in Indian states: 1961-1991. *The Indian Journal of Labour Economics*, 40 (3), 493-505.
- Chaudhri, D. P. (2012). Child Poverty and Compulsory Elementary Education in India: Policy Insights from Household Data Analysis. *Indian Journal of Human Development*, 6 (1), 05-30.
- Chief Labour Commissioner (Central). (2023). *Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986*. Retrieved August 14, 2023, from Government of India Ministry of Labour and Employment: <https://clc.gov.in/clc/acts-rules/child-labour-prohibition-and-regulation-act-1986#>
- Chief Labour Commissioner (Central). (n.d.). *CHILD LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) ACT, 1986*. Retrieved 08 14, 2023, from Government of India Ministry of Labour and Employment.
- Creswell, J. W. (2008). *The Use of Theory*. SAGE Publications.
- Cropley, A. (2021). *Qualitative Research Methods: A practice-oriented introduction* . Bucharest: Editura Intaglio.

- Dalby, S. (2013). Environment Dimension of Human Security, in Environment Security: Approach and Issues.
- David, E. (1957). an Approach to the Analysis of Political Systems. *World Politics*, 9 (3), 383-400.
- Department of Labor. (2022, November 7). *Official Communication with NGO*. Retrieved July 29, 2027, from Department of Labor.
- Deudney, D., & Ikenberry, G. J. (1999). The Nature and Sources of Liberal International Order. *Review of International Studies Vol. 25 No. 2*, 179-196.
- Diamond, C., & Fayed, T. (1998). Evidence on substitutability of adult and child labour. *The Journal of Development Studies*, 34 (3), 62-70.
- Down to Earth. (2022, October 19). *Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2022 : What makes one poor in India?* Retrieved November 14, 2023, from Down to Earth: <https://www.youtube.com/watch?v=Ernu4suO2pc>
- Drishti Ias. (2023, July 14). *National Skill India Mission: Enhancing Youth Employability*. Retrieved July 29, 2024, from Drishti Ias Blog: <https://www.drishtiias.com/blog/national-skill-india-mission-enhancing-youth-employability>
- Duraisamy, M. (1997). Changes in child labour over space and time in India. *The Indian Journal of Labour Economics*, 40 (4), 809-818.
- Ewan, M. (2021). The International Labour Organization's Next Century: Economic Democracy and the Undemocratic Third. *King's Law Journal*, 32 (2), 287-305.
- Express News Service. (2022, April 02). *Pay interim relief to 33 rescued bonded labourers, says Madras HC*. Retrieved July 29, 2024, from Madurai: The New Indian Express: <https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2022/apr/02/pay-interim-relief-to-33-rescued-bonded-labourers-says-madras-hc-2437146.html>
- FEMNET. (2019). *FEMNET*. Retrieved July 25, 2024, from India Profile: <https://femnet.de/en/materials-information/country-profiles/india.html#>
- Ferdinanduscredo99. (2019, Agustus 10). *Organisasi Internasional*. Retrieved Januari 22, 2023, from LCDC Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: <https://lcdc.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/organisasi-internasional/>
- Gartex Texprocess India. (2024, February 01). *GARTEX TEXPROCESS INDIA OPENS TODAY WITH A DYNAMIC SHOWCASE OF CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES*

IN GARMENT AND TEXTILE MANUFACTURING. Retrieved July 29, 2024, from Gartex Texprocess India.

Gautham, K. (2015, September 16). *Child labour flourishes in Tirupur's backyard*. Retrieved December 07, 2023, from Times of India: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/coimbatore/child-labour-flourishes-in-tirupurs-backyard/articleshow/48981408.cms>

Ginkel, H. V. (2007). The Creation of a Non-Traditional Perspective on Human Security: Human Security and the Environment. In *Human Security in the 21st Century* (p. 3). Japan: Hadano-shi: Tokai University Press.

Government of India. (2022). *Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer-2021*. New Delhi: Ministry of Labour and Employment.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of International Regimes. *International Organization* 41(3), 491-517.

Hanzel, M. (2014, 03 20). *SIHI 2: Aktor dalam Studi Hubungan Internasional*. Retrieved 06 04, 2023, from International Relation: <https://matthewhanzel.com/2014/03/20/sihi2/>

Hass, R. N. (2008). In R. N. Hass, *The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance*. (pp. 44-56). US: Foreign Affairs.

Hurrell, A. (2007). *On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society*. Oxford: Oxford University Press.

ILO & UNICEF. (2021). *Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward*. New York: International Labour Office and United Nations Children's Fund.

ILO. (2017, June 13). *A Landmark Step-India Ratifies ILO Conventions on Child Labour*. Retrieved August 14, 2023, from ILO (International Labour Organization): https://www.ilo.org/newdelhi/info/public/fs/WCMS_557730/lang--en/index.htm

ILO. (2017). *An overview of the situation in India regarding working children in India*. New Delhi: ILO.

ILO. (2017). *Working Conditions of Migrant Garment Workers in India (Project GLO/13/53/UKM)*. India: International Labor Office.

- ILO. (2017). *Working Conditions of Migrant Garment Workers in india: A Literature Review*. Geneva: International Labour Office, Fundamental Principles and Rights at Work Branch.
- ILO. (2018). *ILO CONVENTION NO. 138 AT A GLANCE*. International Labour Organization.
- ILO. (2020). *Child Labour in South Asia*. Retrieved November 13, 2023, from International Labour Organization: https://www.ilo.org/newdelhi/areasofwork/child-labour/WCMS_300805/lang--en/index.htm
- ILO. (2022). *Youth employment deteriorated in India: ILO report*. India: INSIGHTS IAS .
- ILO. (n.d.). *ILO in India*. Retrieved August 14, 2023, from International Labour Organization (ILO): https://www.ilo.org/newdelhi/aboutus/WCMS_166809/lang--en/index.htm
- ILO. (n.d.). *Ratifications of C138-Minimum Age Convention, 1973 (No.138)*. Retrieved August 07, 2023, from NORMLEX Information System on International Labour Standards: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312283
- International Labour Organization. (2004). *A Decade of ILO-India Partnerships Towards a Future without Child Labour 1992-2002*. New Delhi: International Labour Office.
- Jackson, R., & Sorenesen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (Fifth Edition)*. Pustaka Pelajar.
- Jha, P. S. (2020, January 14). *Great failures of Indian education*. Retrieved October 10, 2023, from Education World: <https://www.educationworld.in/great-failures-of-indian-education/>
- KBBI. (n.d.). *5 Arti Kata Preferensi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved July 02, 2023, from Lektur.ID: <https://kbbi.lektur.id/preferensi>
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2016). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23-42.
- Kollbrunner, T. (2022, April 13). The dark side of Shein's success . (A. News, Interviewer)
- Krasner, S. D. (1983). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In S. D. Krasner, *International Regimes* (pp. 1-22). Ithaca: Cornell University Press.

- Krisnawati, E. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Utomo.
- Kurniawati, S. L. (n.d.). Neoliberalisme dan Neorealisme dalam Hubungan Internasional. *Academia Edu*, 1.
- Lal, B. S. (2019). Child Labor in India: Causes and Consequences. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 8 (5), 2199-2206.
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2005). *Practical Research: Planning and Design (Twelfth Edition)*. New York: Pearson Education Inc.
- Lieten, G. K. (2002). Child labour and poverty: the poverty of analysis. *The Indian Journal of Labour Economics*, 45 (3), 451-463.
- Locke, J. (2002). *The Second Treatise of Government and A Letter Concerning Toleration (Dover Thrift Editions: Political Science)*.
- Maheshwari, M., & Singh, M. (2008). *Factors Affecting Child Labour in India*. India: Indian Institute of Management Ahmedabad.
- Mathur, S. (2020, June 13). *Ensure Covid doesn't boost child labour, ILO tells India*. Retrieved December 12, 2023, from times of India: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/safeguard-children-from-falling-into-child-labour-trap-ilo-tells-india/articleshow/76345877.cms>
- McCarthy, J. (2019, January 10). *Indian Garment Industry Vows to Stop Abusive Child Labor*. Retrieved July 29, 2024, from Global Citizen: <https://www.globalcitizen.org/en/content/india-garment-industry-child-labor/>
- McGaughey, E. (2021). The International Labour Organization's Next Century: Economic Democracy, and the Undemocratic Third. *King's Law Journal*, 32:2, 287-305.
- Mehta, A. C. (2023). *School Dropped-out Children between 2020-2021 and 2021-2022 (UDISE+)*. Retrieved November 21, 2023, from Education for All in India: <https://educationforallinindia.com/school-dropout-between-2020-21-and-2021-22-udise/#top>
- Mehta, A. C. (2023). *School Dropped-out Children between 2020-2021 and 2021-2022 (UDISE+)*. Retrieved November 21, 2023, from Education for All in India: <https://educationforallinindia.com/school-dropout-between-2020-21-and-2021-22-udise/#top>

- Mezzadri, A. (2014). Indian Garment Clusters and CSR Norms: Incompatible Agendas at the Bottom of the Garment Commodity Chain. *Oxford Development Studies*, 42(2), 238-258.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Second Edition)*. California: SAGE Publications.
- Minister of State for Textile, Smt. Darshana Jardosh. (2022). *Subsidy Support given to Textile Units in Maharashtra*. Mumbai: PIB Mumbai.
- Ministry of Education Government of India. (2019, February 11). *School Education: Right to Education*. Retrieved October 17, 2023, from Ministry of Education Government of India: <https://www.education.gov.in/rte>
- Ministry of Labour & Employment, Government of India. (n.d.). *FAQ On Child Labour*. India: Ministry of Labour & Employment, Government of India.
- Ministry of Labour & Employment, Government of India. (2023). *Updated Material on Child Labour (Children and Work)*. India: Ministry of Labour & Employment, Government of India.
- Ministry of Labour and Employment. (2018). *Annual Report of the Ministry of Labour and Employment 2017–2018*. Ministry of Labour and Employment.
- Ministry of Labour and Employment. (2019). *Annual Report of the Ministry of Labour and Employment 2018–2019*. Ministry of Labour and Employment.
- Ministry of Textiles. (2015). *Note on Indian Textile and Clothing Exports International Trade*. Retrieved September 01, 2023, from Ministry of Textiles: https://texmin.nic.in/sites/default/files/note_on_indian_textile_and_clothing_exports_intl_trade_section_0.pdf
- Ministry of Textiles. (2015). *Note on Indian Textile and Clothing Exports International Trade Section*. India: Ministry of Textiles.
- Ministry of Textiles. (2022). *Subsidy Support given to Textile Units in Maharashtra*. Mumbai: PIB Mumbai.
- Ministry of Women and Child Development. (2018). *Annual Report 2017-2018. Chapter 2: Women Empowerment and Protection*. India: Ministry of Women and Child Development.

- Mitchell, R. B. (1996). Compliance Theory: An Overview. In J. Werksman, J. Cameron, & P. Roderick, *Improving Compliance with International Environmental Law* (pp. 3-28). New York: Routledge.
- Mitchell, R. B. (2001). Institutional Aspects of Implementation, Compliance and Effectiveness. *International Relations and Global Climate Change*, 221-244.
- Mitchell, R. B. (2007). COMPLIANCE THEORY: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law. *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 893-921.
- MSME. (2015). *Brief Industrial Profile of Tiruppur District*. Ram Nagar: Ministry of Micro Small & Medium Enterprises, Government of India.
- National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention. (2021, February 22). *Middle Childhood (6-8 years of age)*. Retrieved October 17, 2023, from Center for Disease Control and Prevention (CDC): <https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/middle.html>
- National Informatic Center (NIC). (2023, February 02). *About Child Labour*. Retrieved August 14, 2023, from Ministry of Labour and Employment, Governemnt of India: <https://labour.gov.in/childlabour/about-child-labour>
- National Sample Survey. (1999-2000). *Employment and Unemployment Survey 55th*. India: ILO.
- National Sample Survey Organization (NSSO). (2022). *India - National Sample Survey 2011-2012 (68th round)*. India: National Sample Survey Organization (NSSO).
- Nurhadi. (2022, Januari 27). *Tempo.co*. Retrieved Januari 22, 2023, from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1554393/ini-6-bentuk-perbudakan-modern>
- Ogata, S. (2003). Chapter 1: Human Security Now. In S. Ogata, & A. Sen, *Human Security Now: Protecting and Empowering People* (p. 2). New York: Comission on Human Security.
- Organization, I. L. (2008).
- Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). (2023). *India National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review 2023*. Oxford: Oxford Department of International Development, University of Oxford.

- Palanivel, R. (2022, March 31). *Has the end of the National Child Labour Project pushed thousands of kids back into child labour?*. Retrieved July 29, 2024, from The Hindustan Times.
- Pawar, M. (2023). Poverty, Policy and the Poor. *Sage Journals*, 5 (2), 137-145.
- (2014). In K.-K. S. Pease, *International Organizations Pease Fifth Edition* (p. 3). London: Harlow, Essex: Pearson Education.
- PIB Delhi. (2022, July 25). *Children and Adolescents are Prohibited to Work and Help in Mines*. Retrieved August 14, 2023, from Ministry Labour and Employment: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1844654>
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2009). International differences in nursing research, 2005–2006. *Journal of Nursing Scholarship*, 41(1), 44–53.
- Pradesh, H. (2024, July 18). *The Integrated Child Protection Scheme*. Retrieved July 29, 2024, from Digital India Corporation (DIC) Ministry of Electronics & IT Government of India: <https://www.myscheme.gov.in/schemes/icps#sources>
- Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. (1983). International Regimes: Lessons from Inductive Analysis. In S. D. Krasner, *International Regimes* (pp. 61-92). Ithaca and London: Cornell University Press.
- Rhodes, V. (2020, October 26). *Pedesaan India Masih Memiliki Akses yang Buruk Ke Pendidikan*. Retrieved October 10, 2023, from Educas in Limite: <https://www.educasinlimite.com/pedesaan-india-masih-memiliki-akses-yang-buruk-ke-pendidikan-berkualitas/>
- Ribhu, P., & Agrawal, S. (2011). *Brief Guide to Garment Manufacturing and Child Labour in Garment Sector in India*. India: Global March.
- Ribhu, P., & Agrawal, S. (2011). *Brief Guide to Garment Manufacturing and Child Labour in Garment Sector in India*. Retrieved September 17, 2023, from Global March: <https://globalmarch.org/wp-content/uploads/2017/09/Brief-Guide-GarmentManufacturingChildLabour-in-GarmentSector-in-India.pdf>
- Riesta, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.1, 25.
- Roshni. (2023, February 22). *Minimum Age for Class 1 Admission to be 6 years, govt orders states and UTs*. Retrieved October 16, 2023, from India Today: <https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/minimum-age-for-class-1-admission-to-be-6-years-govt-orders-states-and-uts-2338181-2023-02-22>

- Rousseau, J.-J. (1762). *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*. London: Swan Sonnenschein & Co.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Save The Children. (2015). *The Hidden Workforce: A Study on Child Labour in the Garment Industry in Delhi*. India: Save The Children India.
- Save the Children. (2015). *The Hidden Workforce: A Study on Child Labour in the Government Industry in Delhi*. India: Save the Children.
- Scruton, R. (1998, October). *Rousseau & the origins of liberalism* . Retrieved August 15, 2023, from The New Criterion: <https://newcriterion.com/issues/1998/10/rousseau-the-origins-of-liberalism>
- Sekhon, G. (2017). *Forced Labor and Child Trafficking in India's Garment Sector*. Retrieved August 07, 2023, from The Asia Foundation: <https://asiafoundation.org/2017/09/20/forced-labor-child-trafficking-indias-garment-sector/>
- Sekhon, G. (2017, September 19). *Forced labour and child trafficking in India's garment sector*. Retrieved July 29, 2024, from Business & Human Rights Resource Center: <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/forced-labour-and-child-trafficking-in-indias-garment-sector/>
- Selvam, N. (2022, March 21). *Child labourers may be left in the lurch as Centre shuts down NCLP scheme*. Retrieved July 29, 2024, from The Federal: <https://thefederal.com/states/south/tamil-nadu/no-ray-of-hope-for-child-labourers-as-central-govt-shuts-down-child-labour-project/>
- Shah, R. K. (2022, April). *India's Initiatives to Boost Textile Sector*. Retrieved July 29, 2024, from FIBRE2FASHION: <https://www.fibre2fashion.com/industry-article/9369/india-s-initiatives-to-boost-textile-sector>
- Singh, A. (2022, July 04). *Delhi: Over Three-Fold Rise in Number of Child Labourers Rescued This Year*. Retrieved September 05, 2023, from The Times of India: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-over-three-fold-rise-in-number-of-child-labourers-rescued-this-year/articleshow/92639372.cms>
- Singh, A. (2023, July 27). *Child labour cases spike in Delhi*. Retrieved December 12, 2023, from Times of India: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/child-labour-cases-spike-in-delhi/articleshow/102153564.cms>

- Srivastava, R. N. (2019). Children at Work, Child Labor and Modern Slavery in India: An Overview. *Indian Pediatrics Volume 56, August 15, 2019.*
- Steans, J., Pettiford, L., Thomas, D., & Imad, E.-A. (2010). *An Introduction to International Relations Theory: Perspective and Theme (Third Edition)*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Subbaraman, S., & Witzke, H. v. (2007). An Overview of Child Labour in India. In G. Herath, & K. Sharma, *Child Labour in South Asia* (pp. 99-112). England: Ashgate.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sull, D. &. (2008).
- the Association for Stimulating Know-How (ASK). (2010). *Indian Workers in Domestic Textile Production and Middle East-Based Manufacturing, Infrastructure and Construction* . India: Verite.
- The Global Statistics. (n.d.). *Poverty of India Statistics*. Retrieved October 10, 2023, from The Global Statistics: https://www.theglobalstatistics.com/poverty-in-india-statistics-2021/?expand_article=1
- The India Textile Journal (ITJ). (2024, January 25). *Weaving the future: India's textile and apparel sector amidst global challenges*. Retrieved July 29, 2024, from The Indian Textile Journal: <https://indiantextilejournal.com/weaving-the-future-indias-textile-and-apparel-sector-amidst-global-challenges/>
- The New Indian Express. (2020, July 31). *Report sought on plea to save kids working in Tiruppur private textile mills* . Retrieved December 07, 2023, from The New Indian Express: <https://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2020/jul/31/report-sought-on-plea-to-save-kids-working-in-tiruppur-private-textile-mills-2177081.html>
- The Times of India. (2021, November 20). *Pandemic pushed 60% students into child labour*. Retrieved December 12, 2023, from The Times of India: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/coimbatore/pandemic-pushed-60-students-into-child-labour/articleshow/87807610.cms>
- U.S Department of Labour. (2021). *International Child Labor & Forced Labor Report: Findings on the Worst Forms of Child Labor-India*. Washington DC: Bureau of International Labor Affairs.

- U.S. Department of Labor. (2020). *Child Labor and Forced Labor Reports India*. Retrieved July 29, 2024, from Bureau of International Labor Affairs:
<https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/india>
- U.S. Department of Labor Organization. (2021). *Findings on the Worst Forms of Child Labor: India*. Washington DC: United States Department of Labor Organization.
- U.S. Department of State. (2022, June 19). *Trafficking in Persons Report- 2022: India*. . Retrieved July 29, 2024, from U.S. Department of State:
<https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/india/>
- U.S. Department of State official (USDOL). (2023, June 29).
- U.S. Embassy. (2023). New Delhi.
- UNESCO Institute of Statistics. (2023, September 13). *Education Data Release 2023*. Retrieved October 25, 2023, from UNESCO Institute for Statistics:
<https://uis.unesco.org/en/news/education-data-release>
- UNICEF. (2021). *Ending Child Labour Through A Multisectoral Approach*.
- UNICEF India. (n.d.). *Child Labour and Exploitation*. Retrieved September 07, 2023, from UNICEF India: <https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-labour-exploitation>
- Venkateswarlu, D., Kasper, J., Mathews, R., & Reis, C. (2003). Child labour in India: a health and human rights perspective. *The Lancet*, VOLUME 362, SPECIAL ISSUE, S32-S33, DECEMBER 2003, S32-S33.
- Warade, P. (2019). *Indian Textile Industry | Challenges | Government Initiatives | Remedies*. Retrieved July 29, 2024, from Textile Sphere:
<https://www.textilesphere.com/2021/08/indian-textile-industry-challenges-remedies-government-initiatives.html>
- Winarni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wintour. (2013).